

330.914.
PAP
P ei

**PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI D.I. YOGYAKARTA**
(Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir "PEMP")

TESIS
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S - 2

Program pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi: Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi: Magister Ilmu Administrasi Publik



Diajukan Oleh:

RIPAN PAPUTUNGAN
D4E002011

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGOROSEMARANG
2003

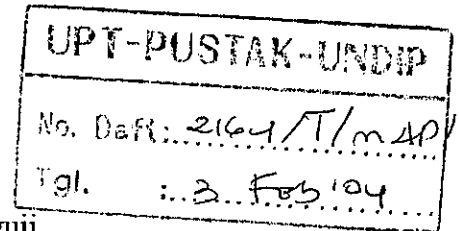
UPT-PUSTAK-UNDIP



**PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI D.I. YOGYAKARTA**
(Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir "PEMP")

Dipersiapkan dan disusun oleh

RIPAN PAPUTUNGAN
D4E002011



Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: 17 September 2003

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Dr. ARI PRADHANAWATI, MS

Penguji I

Dr. PURBAYU BS, MS

Pembimbing II

Drs. ARI SUBOWO, MA

Penguji II

Dra. DYAH HARIANI, MM

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Sain

Semarang, 17 SEP 2003

Prof. Drs. J. WARELLA, MPA, Ph.D.
Ketua Program Studi MAP

Small, faint text or markings in the lower-left quadrant.

Small, faint text or markings in the lower-center area.

RINGKASAN

Paradigma pembangunan saat ini telah bergeser ke arah pembangunan masyarakat dengan strateginya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. *Empowerment* yang berarti pemberdayaan merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat yang di kenal dengan aliran *post modernisme* yang orientasinya adalah *antisistem*, *antistruktur* dan *anti determinisme* pada kekuasaan..

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dipandang dari aspek pemberdayaan, partisipatif, NGO dan teknik PRA, menunjukkan bahwa masyarakat nelayan mempunyai banyak kemampuan mengolah sumber daya laut yang perlu dikembangkan sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat lokal serta ekologiannya. Kegagalan program pemberdayaan masyarakat salah satunya disebabkan oleh *State of mind* berupa dominasi si-kuat terhadap si-lemah, kalau pemberdayaan dimaknai sebagai perubahan relasi subyek obyek menjadi subyek-subyek, kita mendapatkan *outcomes* yang berbeda. Sebab masyarakat lemah memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat yang utama, penciptaan relasi subyek-subyek dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat mengubah paradigma yang selama ini eksis bahwa pemerintah adalah sentral dalam berbagai hal. Sekarang masyarakat-lah fokus dari setiap upaya pemberdayaan.

Kiranya kegagalan program-program yang bersifat karitas selama ini, dapat menjadi pelajaran bagi upaya kita memberdayakan masyarakat. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah perencanaan berpola *Top Down* yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu mengubah model pembangunan yaitu dengan menggunakan strategi pembangunan masyarakat *Bottom Up* dengan memprioritaskan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat memiliki suatu sumber daya apabila diberdayakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.

ABSTRAKSI

Paradigma pembangunan saat ini sudah bergeser ke paradigma pemberdayaan dan partisipatif masyarakat, yang dewasa ini sudah menjadi trend pada setiap program-program pembangunan. Seyogianya, *optimalisasi pemberdayaan sumberdaya kelautan* dilakukan dalam paradigma *kesejahteraan masyarakat nelayan* dan diperlukan berbagai kajian kritis mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan masyarakat nelayan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai faktor internal yang meliputi *sumber daya manusia (SDM)* dan *lingkungan (Ekologi)*. Sedangkan faktor eksternal meliputi *dukungan pemerintah* dan *dukungan masyarakat*. Dengan menggunakan metodologi deskriptif analitik dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat akan terwujud apabila masyarakat nelayan mempunyai kemampuan daya tangkap dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan, produktifitas tinggi serta adanya pemerataan atau keadilan.

ABSTRACT

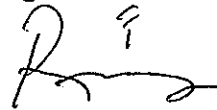
Today the paradigm of development has changed into public empowerment and participation which become a trend in every development program. Obviously, optimisation of ocean resources should be carried out in term of fishermen community prosperity and it is also needed various kritikal studies on publik policies concering the fishermen community. Basicly, the objective of this study is to uncover some factors that effect the coastal community economic empowerment, one of which is identified as internal factor including human resources and ekologikal resources. While external factor includes government and public support. Through analytical descriptive mehod, along with qualitative approach, the result of the study shows that public empowerment will exist only if the fisherment cmmunity have abilities in fish-catching as well as high responsibility, so that public empowerment process would be as it is expected , highly productive, together with equal distribution and justice.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 17 september 2003

Tanda tangan dan nama terang



Ripan Papatungan, Sip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan alhamdulillah kami panjatkan Allah SWT atas perkenanNya, akhirnya tesis dengan judul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)” dapat kami selesaikan.

Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Sain, pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro.

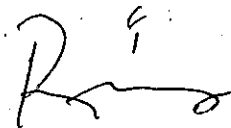
Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik bantuan yang berwujud bimbingan teknis, moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberi dukungan, semangat serta doa dengan tidak mengenal lelah mencari rezeki di “Gontung” untuk membiayai kuliah.
2. Bapak Prof. Drs.Y. Warella, MPA, Ph.D. selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik yang telah banyak memberikan fasilitas selama menempuh studi.
3. Ibu Dr. Ari Pradhanawati, MS. selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang tak ternilai, sampai selesainya tesis ini.
4. Bapak Drs. Ari Subowo, MA. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang tak ternilai, sejak awal sampai terselesainya tesis ini.
5. Bapak Dr. Purbayu BS, MS dan Dra. Dyah Harini, MM selaku penguji I dan II yang telah menguji dan mengarahkan penulis.

6. Buat Kakak-kakak Sugeha, SE dan Eleksanti, Maria, SE dan Rais, Drs. Ridan dan Lisnawati, SE, Saliat, Adm. Com dan Ibdawati, SH, dan adik satu-satunya Yulianti SH dan Bangkala, ST, dan keponakan yang sangat sayangi dan dicintai: Aco, Ceasy dan Danang, terimakasih atas doa dan bantuannya.
7. Yang terkasih dr. Suwarti Rantono, yang telah menemani penulis baik dalam suka dan duka serta bantuan materiil dan immateriil.
8. Sahabat-sahabatku Mulyono, Hendra, Hamka, Nolly, Frayudi, SH, Ketut Jaya putra, ST, MT. Nengah Wiarnanta, SE, MT. Drs. Joksen Thomas Thonty, MT, Muhammad Anis Janwar, ST, MT yang selalu penulis " Bekeng Susah" selama pembuatan tesis ini ..

Akhirnya, penulis menukil pepatah " Tiada Ganing Yang Tek Retak " Sungguh tiada manusia yang merasa sempurna begitu juga didalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, 17 Septembar 2003



RIPAN PAPUTUNGAN
Nim. D4E 002011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI ..	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
Landasan Teori	11
A. Pengkajian Teoritis	11
B. Implementasi Kebijakan	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	50
D. Fenomena yang Diamati	51
E. Jenis dan Sumber Data	51

F. Instrumen Penelitian	52
G. Pemilihan informan (sampel)	52
H. Teknik Pengumpulan Data	53
I. Teknik Analisa Data	53
BAB IV DESKRIPSI KECAMATAN PANJATAN DAN KECAMATAN TEMON	
A. Deskripsi Kecamatan Panjatan	55
A.1. Kondisi Wilayah	55
A.2. Potensi Sumber Daya Alam	57
A.3. Keadaan Penduduk	59
B. Deskripsi Kecamatan Temon	61
B.1. Kondisi Wilayah	61
B.2. Potensi Sumber Daya Alam	64
B.3. Keadaan Penduduk	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	68
B. Lokasi dan Hasil Penelitian	70
B.1. Lokasi Penelitian	70
B.2. Hasil Penelitian	71
B.2.1. Konsep Pemberdayaan	72
B.2.2. Pemberdayaan	76
B.2.3. Partisipasi	80
B.2.4. <i>Non Governmental Organization</i> “NGOs”, Lembaga Masyarakat “LSM”	85
B.2.5. <i>Participatory Rural Appraisal</i> “PRA”	90
B.3. Hubungan Faktor Internal dengan Pemberdayaan Nelayan	95
B.3.1. Hubungan Antara Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Pemberdayaan	95
B.3.2. Hubungan Antara Lingkungan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	99

B.3.3. Hubungan Faktor Eksternal Dengan Pemberdayaan Nelayan	103
C. Analisis Hasil Penelitian	106
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Perbandingan luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo.....	3
2. Teori sistem politik.....	21
3. Teori perencanaan David C Korten	23
4. Proses implementasi Quide	41
5. Model implmentasi Grindle	44
6. Model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier	46
7. Kerangka pemikiran penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	48

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Luas dan prosentase luas wilayah Kabupaten Kulonprogo dirinci menurut Kecamatan dan wilayah pembantu Bupati (Km2) tahun 2001.....	2
2. Jumlah dan luas wilayah desa di Kecamatan Panjatan.....	55
3. Luas desa dirinci menurut penggunaan lahan di Kecamatan Panjatan(Ha).....	56
4. Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Panjatan tahun 2001.....	59
5. Banyaknya kepala keluarga menurut tahapan keluarga di Kecamatan Panjatan tahun 2001.....	60
6. Jumlah dan luas wilayah desa di Kecamatan Temon.....	62
7. Luas desa dirinci menurut penggunaan lahan di Kecamatan Temon(Ha).....	63
8. Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Temon tahun 2001.....	66
9. Banyaknya kepala keluarga menurut tahapan keluarga di Kecamatan Temon tahun 2001.....	67
10. Data-data responden	69
11. Kesenambungan RRA dan PRA.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta wilayah Kabupaten Kulon Progo
2. Lampiran foto
3. Quesioner penelitian
4. Surat keputusan (SK)dari PEMP dan konsultan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu dari lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak paling Barat dengan batas sebelah Barat dan Utara adalah Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia.

Luas area adalah 58.627,5 km² yang dibagi menjadi 12 kecamatan dan 88 desa. Dari luas tersebut 24,87% berada di wilayah Pembantu Bupati (Tuti) Selatan yang meliputi Kecamatan Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap. Wilayah Pembantu Bupati (Tuti) Utara sebesar 36,97% meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Luas kecamatan antara 3.000-7.500 km², dan wilayahnya yang paling luas adalah Kecamatan Kokap seluas 7.379,95 km², sedangkan wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Wates seluas 3.291,23 km².

Secara umum kondisi di Kabupaten Kulon Progo wilayahnya adalah daerah datar meskipun dikelilingi pegunungan yang sebagian besar terletak pada wilayah Utara, luas wilayahnya 17,58% berada pada ketinggian < 7 m di atas permukaan laut, 15,20% berada pada ketinggian 8-25 m di atas permukaan laut, 22,85% berada pada ketinggian 26-100 m di atas permukaan laut, 33,00% berada pada ketinggian 101-500 m di atas permukaan laut dan 11,37% berada pada ketinggian >500 m di atas permukaan laut. Jika dilihat

letak kemiringan luas wilayahnya, 55,81% kemiringannya <15°, 18,73% kemiringannya 16°-40° dan 22,48% kemiringannya >40%.

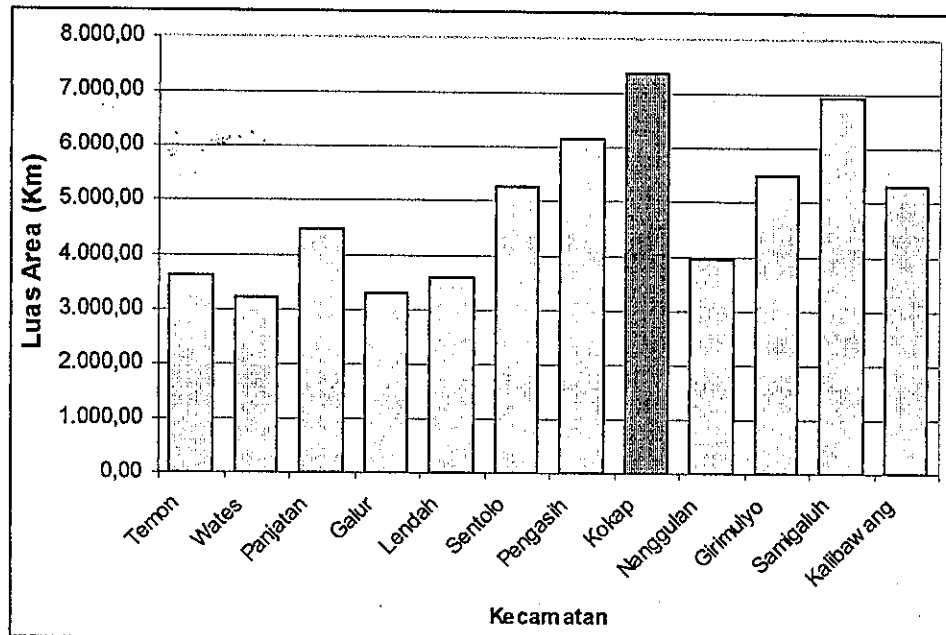
Tabel 1.1

Luas dan Presentase Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo Dirinci Menurut Kecamatan dan Wilayah Pembantu Bupati (Km²) Tahun 2001

Wilayah Pembantu Bupati/Area of <i>Adder Regency/District</i>	Luas Area (Km ²)	Persentase/ <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
Wilayah Selatan/South Area	14.579,7905	24,87
1. Temon	3.629,0890	6,19
2. Wates	3.200,2390	5,46
3. Panjatan	4.459,2300	7,61
4. Galur	3.291,2325	5,61
Wilayah Tengah/Center Area	22.370,9515	38,61
1. Lendah	3.559,1920	6,07
2. Sentolo	5.265,3405	8,98
3. Pengasih	6.166,4685	10,52
4. Kokap	7.379,9505	12,59
Wilayah Utara/North Area	21.676,7695	36,97
1. Nanggulan	3.960,6695	6,73
2. Girimulyo	5.490,4240	9,36
3. Samigaluh	6.929,3075	11,82
4. Kalibawang	5.296,3685	9,03
Kabupaten Kulon Progo	58.627,5115	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Gambar 1.1
Perbandingan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo



Ibukota Kabupaten Kulon Progo adalah Kecamatan Wates. Jarak dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten yaitu, untuk Kecamatan Temon 9 km, Panjatan 4 km, Galuh 2 km, Lendah 14 km, Sentolo 14 km, Pengasih 8 km, Kokap 10 km, Girimulyo 38 km, Nanggulan 26 km, Kalibawang 41 km dan Samigaluh 44 km. Jarak dari kecamatan dan kantor kepala desa 37,50% berjarak <3 km, 34,10% berjarak antara 3-5 km dan 28,40% berjarak >5 km.

Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggara negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga

tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 telah diamanatkan bahwa pembangunan nasional pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah, dimana masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah yang mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang kondusif (menunjang).

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral etiknya.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan mengancam kelangsungan bangsa dan

negara. Karena itu reformasi segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Dengan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta meningkatkan produksi yang diatur dengan Undang-undang.

Sejalan dengan otonomi daerah yang diiringi dengan menguatnya tuntutan demokratisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perhatian pada potensi dan keanekaragaman daerah, maka pembangunan kelautan harus memperhatikan upaya peningkatan kemampuan pemerintah daerah, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah yang ditopang oleh upaya pengembangan masyarakat seperti yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999-2004

Untuk mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini akan mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agrobisnis industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sarana dan prasarana yang tersedia di suatu wilayah merupakan salah satu faktor penentu yang sangat mendukung atau menunjang

pengembangan/peningkatan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo Salah satu sarana yang prospek dikembangkan di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta adalah potensi laut dengan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pengembangan di sektor perikanan laut dan darat, di Kabupaten Kulon Progo merupakan suatu upaya untuk peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Dimana di daerah mi masih luas dan banyak sumber daya alam yang memerlukan penanganan secara intensif dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di bidang kelautan (Imam Supardi, 1994 : 202).

Proses pemberdayaan masyarakat hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal dan unit usaha masyarakat. Pemberdayaan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Upaya tersebut akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan adanya SK Kadin Pertanian dan Kelautan No.188/1133/VIII/2002 tentang penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tahun 2002 di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon ini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan di Kabupaten Kulon Progo. Program PEMP ini akan mendorong masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan

kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengawasan dan pengembangannya.

Berdasarkan Surat Kepala BAPPENAS Nomor 2605/Ka/06/2001 tanggal 18 Juni 2001 dan Nomor 2888/Ka/09/2001 tanggal 4 Juli 2002 perihal Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) TA 2001, Departemen Kelautan dan Perikanan telah mendapat alokasi dana pemberdayaan masyarakat pesisir sebesar 4,8% dari total dana PPD-PSE yang diperuntukkan bagi program tersebut diwujudkan dalam bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun 2001.

Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan, pengawasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tesis ini diberi judul : PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI D.I. YOGYAKARTA (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR "PEMP")

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Kawasan pesisir pantai selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan kawasan yang lain di dalam satu kota. Parameter untuk itu dapat kita lihat dari tingkat ekonomi, pola hidup dan hanya menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Ini adalah salah satu corak kehidupan masyarakat pesisir.

Selama ini juga bantuan pemerintah kepada masyarakat pesisir sangat minim sekali, karena pada pemerintahan masa orde baru hanya menekankan pada pembangunan fisik dan pengembangan, lebih difokuskan pada peningkatan sumber daya alam di darat. Pembangunan tersebut kurang memperhatikan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada sumber daya laut.

Secara khusus, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) lebih menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat. Program ini merupakan program jangka pendek, tetapi diharapkan mempunyai dampak yang berlanjutan (*sustainable*).

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat pada program PEMP.
2. Rendahnya tingkat pendidikan atau pemahaman pada konsep pemberdayaan.
3. Kurangnya sosialisasi tentang PEMP pada masyarakat pesisir (nelayan).
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.
5. Rendahnya kemampuan lembaga masyarakat, organisasi (nelayan).

Dari sekian masalah yang telah diidentifikasi tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta ?

2. Bagaimana faktor-faktor itu berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta.
2. Mendeskripsikan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna pada program PEMP. Untuk menyumbangkan pemikiran pada Pemda Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam bentuk yang lain.
2. Dapat bermanfaat dan memberikan alternatif pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam PEMP di Kecamatan Temon dan Panjatan.
3. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama untuk penelitian yang meneliti permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI

A. Pengkajian Teoritis

Paradigma pembangunan saat ini telah bergeser ke arah pembangunan masyarakat dengan strateginya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. *Empowerment* yang berarti pemberdayaan merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat yang dikenal dengan aliran *post modernisme* yang orientasinya adalah *antisistem, antistruktur, dan antideterminisme* pada kekuasaan. Aliran tersebut mengharuskan bahwa yang menjadi landasan idiil dari suatu sistem baru itu adalah manusia dan kemanusiaan dimana sistem-sistem lama yang serba determinis baik itu sistem keagamaan maupun sistem non keagamaan (sekuler) sama-sama bermuara kepada terjadinya proses *dehumanisasi* eksistensi manusia dan kemanusiaan. Selain itu aliran ini juga menolak segala bentuk kekuasaan baik intelektual, religius, politik, ekonomi, ataupun militer yang secara paksa dan mutlak menguasai manusia sehingga aliran ini bercita-cita dapat menemukan sistem yang sepenuhnya untuk manusia atau membangun humanisme baru (Pranarka dan Vidhyandika 1996 : 44 - 51).

Korten (1992) menjelaskan pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (1996 : 56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Mengapa masyarakat dalam kondisi tidak berdaya ? Karena masyarakat dalam situasi struktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry dalam Adimihardja dan Harry, 2001). Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.

Grand Theories dari konsep *empowerment* (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai, ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan, memiliki perspektif yang lebih luas. Menurut Andrew Pearse dan Michael Stiefel (1979), menyatakan bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif.

Menurut Samuel Paul (1987), mengartikan pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil sehingga ada peningkatan kesadaran politis

dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil pembangunan”.

Dalam mewujudkan pembangunan alternatif, sudah saatnya melihat pentingnya masyarakat tidak lagi sebagai obyek tapi subyek pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat sepenuhnya dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan.

Mengapa demikian? Karena selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya masyarakat cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Sehingga peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program. Masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar.

Kondisi tersebut yang melatarbelakangi tentang konsep partisipasi karena partisipasi sama dengan sebuah proyek atau program dalam pembangunan yang bersifat *top down* yang pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat dan ujung-ujungnya pembangunan tersebut mengalami kegagalan.

Berdasarkan pengalaman di atas, maka perlu mengubah model pembangunan yaitu dengan menggunakan strategi pembangunan masyarakat (*bottom up*) dengan memprioritaskan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya rakyat itu memiliki suatu sumber daya apabila diberdayakan akan muncul karena digali berdasarkan kebutuhan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk mereka sendiri.

Jadi konsep partisipasi menjadi bentuk yang pasif artinya negara termasuk birokrasi sebagai pengambil keputusan yang utama, sehingga tipe partisipasi seperti ini membuat masyarakat tetap tersingkir di dalam proses pembangunan (Midgley, 1986 : 38-44).

Menurut Cohen & Uphoff (1980 : 215-223) dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap :

1. Pembuatan keputusan
2. Penerapan keputusan
3. Penikmatan hasil, dan
4. Evaluasi

Adimihardja dan Harry (2001 : 15) menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti :

1. Perumusan konsep
2. Penyusunan model
3. Proses perencanaan
4. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan
5. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan

Dengan demikian partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai "sadar" akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang

menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993).

Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis kemudian mencari solusinya.

Peran pendamping sangat penting untuk memperlancar proses dialog antar individu di dalam kelompok tadi, dengan cara ikut berperan sebagai orang yang belajar dari kelompok tersebut (Norman, 1977). Pendamping hanya berfungsi sebagai stimulator atau pemicu diskusi dan harus bersikap netral dan tidak berhak mencampuri keputusan dari hasil diskusi.

Menurut pendapat Midgley (1986 : 38 : 44), partisipasi hanya sebagai alat pemanfaatan tenaga manusia. Keterlibatan manusia hanya terbatas pada proses implementasi program. Kesempatan bagi masyarakat adalah membuat programnya sendiri yang diasumsikan akan menciptakan "rasa memiliki" terhadap program tersebut.

Dengan demikian, masyarakat terlibat dalam empat fase partisipasi, yaitu fase pembuatan keputusan (program), penerapan keputusan, pemanfaatan hasil-hasilnya serta evaluasi.

Menurut Kartjono (1988 : 33), masyarakat pinggiran, pedesaan dan masyarakat lapisan bawah perlu diberdayakan karena mereka masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam partisipasi, solidaritas, kemandirian, ketrampilan dan taraf hidup.

Kondisi di atas berkaitan dengan masalah perbedaan wacana mengenai pembangunan dan partisipasi masyarakat, yaitu dari wacana pemerintah dan wacana masyarakat.

Menurut Widyaatmadja (1992 : 7) dan Goulet (1996 : 105) partisipasi dalam wacana pemerintah adalah lebih menekankan pada pengorbanan dan kontribusi rakyat daripada hak rakyat untuk ikut menikmati manfaat pembangunan itu sendiri.

Sedangkan dari perspektif rakyat, partisipasi merupakan praktek dari keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan (Widyaatmadja, 1992 : 7).

Peran *Non Governmental Organizations (NGOs)* dalam memberdayakan rakyat menurut Ismawan (1983), sebagai berikut :

1. Berperan sebagai fasilitator dan katalisator.
2. Berperan sebagai pelatih dan pendidik.
3. Berperan sebagai pemupuk modal dengan melakukan penghematan, menabung dan usaha produktif.
4. Penyelenggara proyek-proyek stimulan.

NGOs di Indonesia dikenal dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) muncul sebagai alternatif model pembangunan di luar model pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah khususnya di negara-negara sedang berkembang atas dorongan dari pihak asing yang bersedia memberi donor atau bantuan dana. Oleh sebab itu keberadaan LSM dapat mendorong terjadinya demokratisasi pembangunan terutama dalam mengupayakan atau memberdayakan masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kegiatan dari *NGOs* menurut pendapat Prijono (1996 : 98) adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses dan dampak pembangunan, pengembangan, perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan peran *NGOs* menurut pendapat Prijono (1996 : 98) sebagai agen perubahan (*agents of change*) yaitu berperan sebagai fasilitator pendidikan masyarakat, komunikator bagi kepentingan masyarakat lapisan bawah, katalisator dan dinamisator transformasi sosial, serta mediator antara pemerintah atau lembaga lain (bank) dan masyarakat.

Teori aktor ini pertama kali dikenal dan dikembangkan oleh Normal Long dalam rangka menjawab kemandegan berbagai pendekatan yang digunakan dalam berbagai studi pedesaan pada tahun 1970-an, khususnya dalam mendesain bagaimana seharusnya proyek-proyek pembangunan dirancang dan dilaksanakan. Teori ini sudah teruji di negara Meksiko, Bolivia, Chili dan beberapa negara Afrika.

Isu sentral dari teori aktor ini adalah bagaimana sebuah kegiatan yang bersifat *intervention* dari luar atau dari pemerintah, misalnya berupa proyek,

dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk mengerti semua masalah kehidupan nyata masyarakat, maka seorang peneliti atau pelaksana sebuah proyek harus mengerti proses-proses sosial yang terjadi dengan jalan masuk pada kehidupan nyata aktor-aktor tersebut (Long and Long, 1992: 55-58). Aktor di sini tidak terbatas hanya individu, tetapi dapat juga terdiri atas kelompok atau group manusia.

Prinsip-prinsip penggunaan konsep peranan aktor dalam studi yang penulis lakukan adalah : *pertama*, melakukan investigasi mengenai hal yang berkaitan dengan organisasi kelompok masyarakat pemanfaat (kelompok nelayan). Pada langkah ini ingin diketahui bagaimana para aktor nelayan atau organisasi kelompok masyarakat pemanfaat mengorganisasikan kelompok nelayan.

Kedua, melakukan interpretasi perubahan sikap para aktor lokal (nelayan peserta program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, PEMP) yang bersifat strategis terhadap program baru yang ditawarkan oleh pemerintah (dalam hal ini BAPPENAS). Strategi ini berkaitan dengan bagaimana para nelayan memecahkan masalah pekerjaan dan kebutuhan, mengelola laut, serta bagaimana mengorganisasikan problem tersebut.

Termasuk di sini adalah mencari informasi tentang manfaat program pemerintah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta seberapa jauh proyek ini mempunyai perhatian terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan.

Uraian secara singkat tentang pendekatan konsep aktor tersebut di atas, bukan merupakan hal baru dalam teori-teori sosial, tetapi dapat dikatakan

cukup baru jika konsep tersebut diterapkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh pemberdayaan masyarakat pesisir peserta proyek PEMP dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut.

Pemberdayaan pada dasarnya dapat dianggap sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait yang membentuk satu kesatuan. Dalam hal ini berarti keberhasilan pemberdayaan dalam mengelola sumber daya pesisir atau laut. Pelaksanaan proyek dan aktivitas lainnya akan dipengaruhi oleh elemen-elemen sistem. Gangguan yang terjadi pada salah satu elemen sistem pada pemberdayaan akan berpengaruh terhadap elemen yang lainnya secara keseluruhan.

Berdasarkan Teori Sistem David Easton (1993 : 5) keberhasilan pemberdayaan akan ditentukan oleh elemen-elemen kebudayaan, ekologi, ekonomi, kepribadian, struktur sosial dan demografi. Masing-masing sistem ini merupakan suatu kumpulan besar variabel-variabel dalam lingkungan tersebut yang membantu atau mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk ke dalam satu sistem.

Anggota-anggota setiap masyarakat bertindak atau bertingkah laku di dalam kerangka dari suatu budaya yang membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka dan prosedur-prosedur yang oleh mereka dianggap harus diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Setiap kebudayaan mendapatkan sifat uniknya sebagian dari fakta bahwa kebudayaan itu menekankan satu atau beberapa segi perilaku khusus, dan penekanan strategis

inilah yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan yang lain dalam hal tuntutan-tuntutan yang diajukan. Beberapa kebudayaan sangat menekankan segi kebutuhan ekonomi, keberhasilan ekonomi, kebebasan individu dan efisiensi rasional.

Segala sesuatu yang diperlukan dan diproses menjadi keluaran yang dikehendaki disebut dengan masukan (Ndraha, 1989:142). Dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan maka masukan tersebut akan meliputi : dukungan, tuntutan, permintaan, kritik, informasi, teknologi dan sumber daya yang lainnya. Dalam elemen masukan akan nampak dukungan anggota masyarakat kepada pemerintah yaitu melalui partisipasi dan pemberdayaan. Dalam proses pemerintahan akan terjadi konversi untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*). Proses itu antara lain proses pemenuhan kebutuhan, proses produksi, proses manajemen, dan proses birokrasi. Jika dikaitkan dengan administrasi maka proses tersebut dapat berupa kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah disetiap strata pemerintahan baik di pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan di desa/kelurahan. Hasil dari proses tersebut adalah *output* (keluaran) pemerintah.

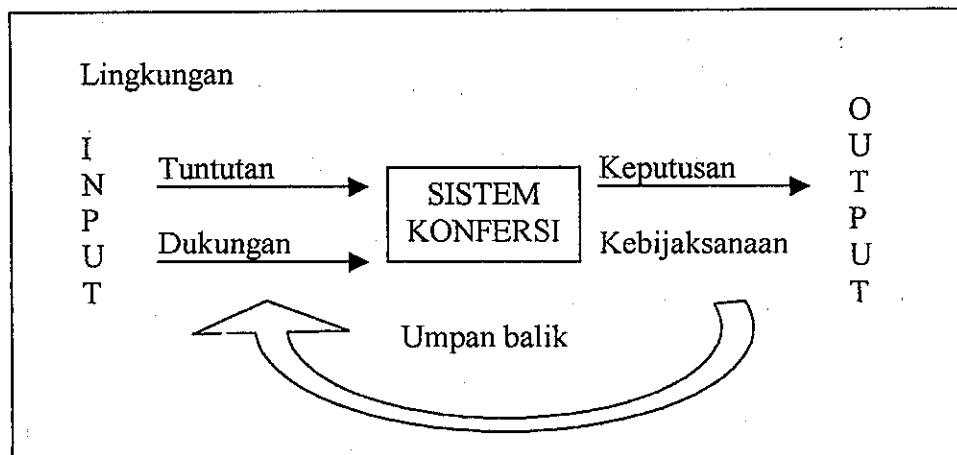
Dilihat dari segi bangsa, maka keluaran yang dimaksud merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Tujuan itu dapat dibaca di dalam UUD 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD itu sendiri, dan secara operasional tertuang dalam pelaksanaan fungsi pemerintah

yaitu fungsi pembangunan (*development*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pelayanan publik (*public service*) tadi.

Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam elemen lingkungan. Artinya, agar pemerintah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik maka pemerintah harus mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Konsep lingkungan yang dimaksud oleh penulis disini meliputi lingkungan fisik, dan lingkungan sosial (masyarakat). Lingkungan fisik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tempat kegiatan unit pemerintah dalam melaksanakan proses tadi. Sedangkan lingkungan sosial adalah kondisi masyarakat yang menjadi bagian dari proses tersebut, baik sebagai sumber bahan baku maupun sebagai konsumen terhadap output yang dihasilkan oleh pemerintah. Masyarakatlah pada akhirnya bertindak sebagai penilai dari keluaran (*output*) dari proses pemerintahan. Penilaian tersebut akan berfungsi sebagai umpan balik (*feedback*) bagi masukan dalam tahap berikutnya.

Untuk mengetahui bagaimana suatu sistem bekerja dan menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada. Rumusan ini sangat sederhana cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal : input – sistem atau proses – output. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat di gambar berikut :

Gambar 2.1
Teori sistem politik



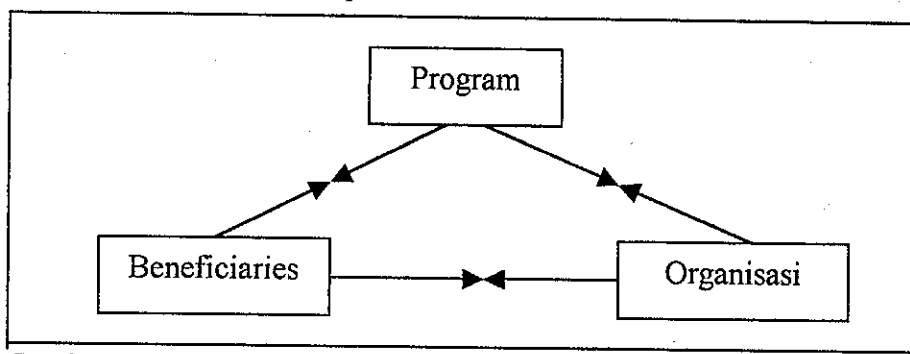
Sumber : Teori perbandingan sistem politik David Easton, 1987.

Agar supaya perencanaan program pemberdayaan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat hendaknya dibuat berdasarkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri *bottom up* (suara dari bawah). Sebagaimana teori perencanaan David C. Korten (1983) mengemukakan bahwa perlu adanya kesesuaian (*critical fit*) antara *beneficiaries*, organisasi dan program. *Benefeciaries* dapat berupa beneclaries yaitu : kebutuhan-kebutuhan bagi mereka yang akan menerima pembangunan tersebut atau kebutuhan bagi mereka yang akan dibangun. Cara-cara mereka menyampaikan tuntutan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Organisasi meliputi, proses keputusan yang diambil organisasi tersebut dan kemampuan yang dimiliki organisasi. Program berupa hasil-hasil yang disetujui, syarat-syarat program harus sesuai dengan ketiga variabel antara lain :

1. Kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat yang akan dibangun, yaitu masyarakat penerima bantuan.

2. Proses keputusan yang diambil harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki organisasi.
3. Kesesuaian antar program dan organisasi terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh program sesuai dengan kemampuan organisasi yang memberikan pelayanan, seperti dalam gambar berikut :

Gambar 2.2
Teori perencanaan David C. Korten



Sumber : Teori perencanaan David C. Korten, 1983.

Dari uraian di atas maka dapatlah penulis mengambil kriteria (faktor-faktor) yang dipergunakan untuk menilai variabel kualitas pemberdayaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemberdayaan, Pranarka dan Vidhyandika (1966 : 56)

Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif.

2. Partisipasi, Kohen dan Uphoff (1980 : 215-223)

Partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi.

3. Non Government Organisation (NGO), Prijono (1996: 98)

Organisasi non pemerintahan yang bertujuan untuk perubahan (*agents of change*) yaitu berperan sebagai fasilitator, katalisator dan dinamisator.

4. Partisipasi rural appraisal, Robert Chambers

PRA merupakan metode dan pendekatan pembelajaran mengenai kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, oleh masyarakat itu sendiri.

Pengertian PRA secara harfiah. Jika istilah "*Participatory Rural Appraisal*" (PRA) diterjemahkan secara harfiah atau kata per kata, maka artinya adalah "*Penilaian / Pengkajian / Penelitian (Keadaan) Desa secara Partisipatif*". Dengan demikian, metode PRA artinya adalah cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kasus desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengertian Partisipatif (*Participatory*), PRA memang dimaksudkan untuk mengembangkan "*partisipasi*" masyarakat (diterjemahkan sebagai '*keikutsertaan*' masyarakat). pertanyaan yang muncul adalah siapa yang ikut serta dalam kegiatannya siapa ? Dengan cita-cita dasar bahwa kegiatan pembangunan pada akhirnya dikembangkan dan dimiliki sendiri oleh masyarakat, hal ini berarti yang ikut serta adalah "*orang tua*", yakni para petugas lembaga-lembaga pembangunan masyarakat pada kegiatan masyarakat. bukan sebaliknya, masyarakatlah yang ikut serta pada kegiatan "*orang tua*". Artinya, program bukan dirancang oleh orang luar kemudian masyarakat diminta ikut melaksanakan, tetapi program dirancang oleh orang luar kemudian masyarakat diminta ikut melaksanakan, tetapi program dirancang oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh orang luar. Dengan

pemikiran ini, aktivis pembangunan selalu menempatkan masyarakat sebagai perilaku utama pembangunan.

Metode dan teknik-teknik PRA tidak hanya sesuai untuk diterapkan di daerah rural/desa, tetapi juga di daerah kota atau daerah pertemuan antara desa dan kota. Dengan demikian, akan lebih tepat apabila PRA mencantumkan "kajian masyarakat" daripada "kajian desa".

Selanjutnya PRA memang mengandung aspek "*appraisal*" atau "*penelitian*". Metode PRA mengembangkan teknik-teknik kajian keadaan masyarakat, tetapi metode PRA sendiri bukanlah metode penelitian yang menekankan pada penggunaan teknik-teknik PRA untuk pengumpulan data. Metode PRA merupakan metode pembelajaran masyarakat. Teknik-teknik kajian keadaan masyarakat tersebut hanyalah sebagai alat pada proses belajar dengan masyarakat. proses belajar itu sendiri tidak berhenti pada saat kegiatan pengkajian keadaan saja, tetapi juga pada saat "*orang tua*" menjalankan program bersama masyarakat. Karena, justru tujuan praktis kegiatan pengkajian dengan menggunakan teknik-teknik PRA itu adalah untuk pengembangan program.

Pengertian menurut Robert Chambers. Robert Chambers sebagai orang yang mengembangkan Metode PRA, menyatakan bahwa metode dan teknik yang digambarkan sebagai PRA berkembang sangat pesat sehingga tidak ada gunanya untuk memberikan definisi final. PRA merupakan metode dan pendekatan pembelajaran mengenai kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, oleh masyarakat pedesaan sendiri. Dengan catatan :

- Pengertian belajar ini meluas, meliputi kegiatan menganalisis, merencanakan dan bertindak.
- PRA lebih cocok disebut metode-metode atau pendekatan-pendekatan (jamak) daripada metode pendekatan (tunggal).
- PRA memiliki metode-metode dan teknik-teknik yang bisa kita pilih. Sifatnya selalu terbuka untuk menerima cara-cara dan metod baru yang dianggap cocok.

Dengan demikian definisi PRA : *"Sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan."*

Seperti yang telah disebutkan, Metode PRA dikembangkan dari sumbangan berbagai tradisi dan metode yang telah ada sebelumnya. Menjadi begitu populernya nama PRA pada saat ini, bukan berarti bahwa sikap kritis terhadap metode ini tidak diperlukan lagi. Penjelasan dibawah ini tidaklah bermaksud untuk menyatakan bahwa metode ini sudah final dan terbaik, tetapi merupakan penjelasan bahwa PRA merupakan bagian dari proses pertumbuhan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan masyarakat agar tepat guna.

Adanya kritik terhadap pendekatan pembangunan yang 'top-down'. Selama ini, program pembangunan masyarakat lebih banyak direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat menjadi sasaran. Program demikian bersifat diturunkan 'dari atas

ke bawah' (*top-down*), artinya : diturunkan dari pemimpin lembaga kepada pelaksana dan masyarakat. Walaupun program semacam ini didasarkan kepada proses 'penjagaan kebutuhan' (*need assessment*) masyarakat, namun hal ini dilaksanakan hanya berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti.

Berbagai kritik sering dilontarkan terhadap pola pengembangan program yang masih '*diturunkan dari atas ke bawah*' seperti itu, antara lain :

- Dalam pola tersebut sering terjadi ketidaksamaan antara para peneliti/para pemrakarsa dan para pelaksana program. Penelitian yang terlalu akademis terlampau dipengaruhi oleh wawasan, pikiran, dan pandangan penelitiannya sendiri, sehingga nilai terapannya sangat kurang. Dengan sendirinya program yang disusun berdasarkan penelitian itu tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan praktis yang sesungguhnya dirasakan masyarakat.
- Keterlibatan masyarakat dalam program yang "*diturunkan*" berupa paket hanyalah sekedar sebagai pelaksana, masyarakat tidak merasa sebagai "*pemilik*" program karena mereka tidak melihat hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan dan program yang akhirnya diturunkan. Dengan sendirinya dukungan masyarakat terhadap program seperti itu akan sangat pura-pura, demikian pula partisipasi mereka.
- Keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelaksana saja kurang mendidik dan kurang menjamin keberlanjutan program karena prakarsa selalu datang dari "*luar*", dan ketrampilan pengkajian, perencanaan, dan pengorganisasian, tetap dimiliki "*orang luar*".

Munculnya pemikiran tentang pendekatan partisipatif. Kritik dan alasan-alasan seperti yang melahirkan beragam pemikiran tentang pendekatan dan pengembangan program yang lebih partisipatif. Istilah-istilah seperti seperti '*partisipasi masyarakat*' dan '*bottom-up planning*' (perencanaan dari bawah atau dari masyarakat), pada saat ini sudah menjadi bagian yang lumrah dalam istilah para aktivis pembangunan masyarakat, baik di kalangan lembaga-lembaga swasta maupun di kalangan pemerintah. Apabila masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses program, selain program itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rasa kepemilikan warga masyarakat terhadap program lebih tinggi, juga keterampilan-keterampilan analisis dan perencanaan tadi dipindahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, di masa yang akan datang ketergantungan pada pihak "*luar*" dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program secara bertahap akan bisa dikurangi.

Tantangan yang kemudian dihadapi lembaga-lembaga ini adalah menemukan cara untuk mewujudkan pendekatan yang partisipatif secara praktis di lapangan. Pilihan (alternatif) yang kemudian dianggap layak dicoba adalah seperangkat metode dan teknik yang dikenal dengan "*Participatory Rural Appraisal*" atau '*PRA*'. Pendekatan ini dianggap baik karena didasari prinsip-prinsip untuk mewujudkan partisipasi masyarakat sekaligus memiliki teknik-teknik terapannya.

Dengan demikian, secara garis besar latar belakang metode PRA adalah :

- a. *Kebutuhan adanya metode kajian keadaan masyarakat yang 'mudah' dilakukan untuk pengembangan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat.*

Seperti yang telah dijelaskan, 'PRA' mencakup aspek 'penelitian', namun tekanan aspek ini bukan pada 'validitas ilmiah' (kebenaran ilmu) dari data yang diperoleh, namun lebih pada penerapan prinsip pembelajaran masyarakat dan pada nilai praktis pengembangan program masyarakat yang berasal dari masyarakat. 'PRA' merancang proses dan *visualisasi* (alat peraga atau gambar) yang mudah ditangkap dan dapat dilaksanakan di tingkat desa dengan sarana seadanya, dengan harapan nelayan dapat memahami dan pada akhirnya dapat melakukan sendiri dengan peran 'orang luar' yang minimal. Dari kacamata para akademisi, pendekatan penyederhanaan dan adaptasi teknik tersebut sering dikritik, karena dianggap mengabaikan ketepatan data dan ketajaman analisa. Namun hal ini diimbangi dengan kekayaan informasi yang sangat lokal, seperti pandangan pengetahuan tradisional para petani sendiri.

- b. *Kebutuhan adanya pendekatan program pembangunan yang bersifat kemanusiaan berkelanjutan.*

'PRA' adalah salah satu metode pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pengembangan program pembangunan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai pelaku aktif (subyek) pembangunan, yaitu sebagai 'peneliti', perencana, dan pelaksana program pembangunannya

sendiri. Dengan keterlibatan tersebut, diharapkan agar tercapai pemberdayaan masyarakat atau penguatan kemampuan masyarakat yang merupakan cita-cita dan misi utama metode PRA. Salah satu dari penguatan kemampuan itu adalah mendorong agar warga masyarakat mengembangka alternatif (pilihan) pemecahan masalah, bukan hanya sekedar '*konsumen*' pemecahan masalah (teknologi) yang dikembangkan di lembaga-lembaga riset dan diterapkan kepada mereka oleh lembaga program. Dengan demikian, pembangunan akan bersifat berkelanjutan karena memperhatikan pembangunan manusia dan pembangunan teknologi sederhana (tepat guna), bukan hanya pembanguna fisik serta modernisasi berupa teknologi mutakhir yang dikuasai oleh segelintir orang berpendidikan tinggi, sedangkan masyarakat banyak semakin tersisih.

Salah satu masalah dengan penamaan atau istilah PRA adalah adanya anggapan bahwa PRA hanya sekedar metode '*pengkajian*' atau metode '*penelitian*' (oleh) masyarakat. Sejumlah prinsip-prinsip dasar metode PRA yang akan diuraikan di bawah ini, memperlihatkan adanya nilai-nilai atau keyakinan dalam PRA karena bukan sekedar pengkajian atau penggalian informasi saja.

Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan). Sering terjadi dalam masyarakat, sebagian besar lapisan masyarakat tetap berada di pinggir arus pembangunan yang berjalan cepat. Karena itu, prinsip paling pertama metode PRA ialah mengutamakan masyarakat yang terabaikan tersebut agar memperoleh kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam

kegiatan program pembangunan. Keberpihakan terhadap golongan masyarakat yang terabaikan bukan berarti bahwa golongan masyarakat lainnya (elite masyarakat) perlu mendapat giliran untuk diabaikan atau tidak diikutsertakan. Keberpihakan ini lebih pada upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan yang terdapat di suatu masyarakat, dengan mengutamakan golongan paling miskin agar kehidupannya meningkat.

Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat. Pendekatan PRA bermuatan peningkatan kemampuan masyarakat. Kemampuan itu ditingkatkan di dalam proses pengkajian keadaan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, sampai pada pemberian penilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang berlangsung. Dengan kata lain, masyarakat memiliki *akses* (peluang/kesempatan) dan *kontrol* (kemampuan memberikan keputusan dan memilih) terhadap berbagai keadaan yang terjadi di seputar kehidupannya. Dengan demikian mereka bisa mengurangi ketergantungan terhadap bantuan '*orang luar*', terutama bila bantuan itu bersifat merugikan (melemahkan posisi masyarakat/nelayan).

Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator. Metode PRA menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kegiatan pembangunan. '*Orang luar*' harus menyadari perannya sebagai '*fasilitator*'. Dan bukannya '*guru*', '*penyuluh*' atau bahkan '*instruktur*'. Hal seperti ini mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan karena adanya anggapan bahwa masyarakat miskin itu bodoh. Bahkan terdapat anggapan bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh kebodohan. Untuk itu, perlu sikap

rendah hati serta kesediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Kalaupun pada awalnya peran '*orang luar*' lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan PRA pada warga masyarakat itu sendiri.

Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Salah satu prinsip dasar adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan memperlihatkan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun, sebaliknya telah terbukti pula bahwa pengetahuan '*modern*' yang diperkenalkan oleh '*orang luar*' tidak juga memecahkan masalah mereka karena tidak cocok. Bahkan dalam banyak kasus, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya harus dilihat bahwa pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan orang luar saling melengkapi dan sama bernilainya, dan bahwa proses '*PRA*' adalah ajang komunikasi antara kedua sistem pengetahuan itu untuk melahirkan sesuatu yang baik.

Prinsip santai dan informal. Kegiatan PRA diselenggarakan dalam suasana yang bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi yang santai ini menimbulkan hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota masyarakat, bukan sebagai '*tamu*

asing yang oleh masyarakat harus disambut dengan segala protokol. Terkadang menjadi tradisi bagi masyarakat desa untuk menerima kedatangan orang di luar komunitasnya dengan semacam penyambutan, seperti berkumpulnya para tokoh adat dan pemerintah desa, jamuan dan tarian adat. Barangkali suasana santai dan informal ini lebih cocok disebutkan sebagai salah satu tip untuk pemandu, tetapi hal ini menjadi prinsipil karena sering dilanggar. Penerapan PRA diharapkan untuk sama sekali tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. Orang luar harus memperhatikan jadwal kegiatan masyarakat bukan sebaliknya masyarakat diharuskan mengikuti jadwal orang luar dalam kegiatan PRA yang tepat waktu.

Prinsip triangulasi. Salah satu kegiatan PRA adalah usaha mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis bersama masyarakat. usaha itu akan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada. Namun, kita tahu, tidak semua sumber informasi itu senantiasa bisa dipercaya ketepatannya. Untuk mendapatkan informasi yang kedalamannya bisa diandalkan kita bisa menggunakan triangulasi yang merupakan bentuk *'pemeriksaan dan pemeriksaan ulang'* (*'check and re-check'*) informasi. Triangulasi dilakukan antara lain melalui penganekaragaman keanggotaan tim (keragaman disiplin ilmu atau pengalaman), penganekaragaman sumber informasi (keragaman latar belakang golongan masyarakat, keragaman tempat, jenis kelamin), dan variasi teknik.

Keragaman teknik PRA, setiap teknik PRA mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh, dibahas,

dan dimanfaatkan dengan satu atau dua teknik saja. Karenanya, bersama masyarakat kita harus bisa melihat bagaimana teknik-teknik 'PRA' dapat saling melengkapi, sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan program.

Keragaman sumber informasi. Masyarakat selalu memiliki bentuk hubungan yang kompleks (rumit) dan memiliki berbagai kepentingan yang sering berbeda bahkan bertentangan. Informasi yang berasal dari sumber tunggal atau terbatas tidak jarang diwarnai oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, sangat perlu mengkaji silang informasi dari sumber informasi yang berbeda asalkan relevan atau berhubungan. Informasi dari kelompok elite masyarakat perlu dikaji silang dengan informasi dari masyarakat biasa, demikian juga informasi dari kelompok laki-laki dikaji silang dengan pendapat perempuan, juga informasi dari sumber lainnya saling dikaji silang, seperti dari kelompok kaya dan miskin, kelompok muda dan tua, dan sebagainya.

Keragaman latar belakang tim pemandu / tim PRA. Pelaksanaan kajian dengan teknik-teknik PRA bisa dilakukan oleh perorangan (misal oleh petugas lapangan dalam menjalankan kegiatannya) maupun secara khusus oleh sebuah Tim yang terdiri dari sejumlah orang (misal dalam kegiatan kajian keadaan yang cukup luas untuk perencanaan kegiatan atau evaluasi kegiatan yang sudah berlangsung sekian lama). Dalam hal penerapan PRA dengan tim semacam ini dianjurkan keberagaman latar belakang tim, baik itu dari segi pendidikan, pengalaman, ketrampilan, dan jenis kelamin. Keikutsertaan

masyarakat dalam tim inti PRA memerlukan pertimbangan tersendiri. Persoalannya adalah mereka memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan anggota tim lain, yang selain orang luar juga biasanya berpendidikan lebih tinggi. Keuntungan menyertakan nelayan merupakan nilai yang tinggi, kegiatan ini juga akan menampilkan sisi pengamatan dari orang dalam yang bersikap sebagai orang luar (menjadi tim yang memfasilitasi kegiatan).

Prinsip mengoptimalkan hasil. Dalam upaya mengumpulkan informasi seringkali dilakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dan ternyata banyak dari informasi tersebut yang tidak diperlukan atau tidak dipergunakan. Walaupun sudah banyak teknik PRA yang dipergunakan untuk mengkaji, tetapi tim pemandu seringkali merasa bahwa informasi yang terkumpul belum lengkap atau belum mendetail.

Tim pemandu pada saat persiapan perlu merumuskan secara jelas jenis dan tingkat kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hanya, jangan lupa bahwa kebutuhan informasi tim pemandu semestinya menyerap juga pendapat masyarakat tentang informasi-informasi yang menurut masyarakat itu lebih penting daripada yang dirumuskan oleh tim pemandu.

Berikut ini adalah penjabaran dari prinsip mengoptimalkan atau memperoleh hasil informasi yang tepat guna menurut Metode PRA :

- a. Lebih baik kita *tidak tahu tentang apa yang tidak perlu kita ketahui*
(ketahui secukupnya saja)

- b. Lebih baik kita *tidak tahu apakah informasi itu bisa disebut benar seratus persen tetapi diperkirakan bahwa informasi itu cenderung mendekati kebenaran* (daripada kita tidak tahu sama sekali).

Prinsip orientasi praktis. PRA berorientasi praktis, yakni pengembangan kegiatan. Untuk itu dibutuhkan informasi yang sesuai dan memadai, agar program yang dikembangkan bisa memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Karena itu, PRA bukanlah kegiatan yang dilakukan demi PRA itu sendiri. PRA hanya sebagai alat atau metode yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program-program yang dikembangkan bersama masyarakat. penerapan metode PRA tidak hanya sekedar untuk menggali informasi dari masyarakat tetapi menindaklanjutinya ke dalam kegiatan bersama.

Prinsip keberlanjutan dan selang waktu. Kepentingan-kepentingan dan masalah-masalah masyarakat tidaklah tetap, tetapi berubah dan bergeser menurut waktu sesuai dengan berbagai perubahan dan perkembangan baru dalam masyarakat itu sendiri. Karenanya, pemahaman masyarakat bukanlah usaha yang sekali dilakukan kemudian selesai, namun merupakan kegiatan berlanjut. Metode PRA bukanlah '*paket kegiatan PRA*' yang selesai setelah kegiatan penggalian informasi dianggap cukup, dan orang luar yang memfasilitasi kegiatan keluar dari desa. PRA merupakan metode yang harus dijiwai dan dihayati oleh lembaga dan para pelaksana di lapangan, agar program yang mereka kembangkan secara terus menerus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar PRA yang mencoba menggerakkan potensi masyarakat.

Prinsip belajar dari kesalahan. Melakukan kesalahan dalam kegiatan PRA adalah sesuatu yang wajar. Yang terpenting bukanlah kesempurnaan dalam penerapannya, yang tentu sukar dicapai, melainkan penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian, kita belajar dari kekurangan-kekurangan/kesalahan yang terjadi, agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling penting diingat adalah bahwa kegiatan PRA bukanlah kegiatan '*coba-coba*' (*'trial and error'*) yang tanpa perhitungan. Kita harus meminimalkan dan mengurangi kesalahan.

Prinsip terbuka. Prinsip ini menganggap PRA sebagai metode dan perangkat teknik yang belum selesai, sempurna, dan pasti benar. Diharapkan bahwa teknik-teknik itu senantiasa bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Sumbangan-sumbangan dari mereka yang langsung menerapkan dan menjalankannya di lapangan untuk memperbaiki konsep, pemikiran maupun merancang teknik-teknik baru, akan sangat berguna dalam memperkaya metode ini.

Visi dan tujuan metode PRA. Pengertian '*visi*' adalah '*pandangan*' terhadap keadaan masyarakat atau kehidupan yang melahirkan keinginan mendalam (*cita-cita*) untuk melakukan sesuatu. Dengan memahami pengertian PRA serta prinsip-prinsip dasarnya, sebenarnya telah tergambarkan apa yang menjadi *cita-cita* berkembangnya metode PRA. Ketimpangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh proses pembangunan masih sangat besarnya, *cita-cita* pendekatan PRA adalah perubahan sosial dan pemberdayaan (penguatan) masyarakat agar ketimpangan itu ditiadakan atau

dikurangi. Kesejahteraan seharusnya dinikmati secara adil dan merata.

Beberapa catatan penting mengenai hal ini adalah :

- Pemberdayaan masyarakat sebagai perubahan perilaku serta perubahan sosial

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk 'merubah' masyarakat agar menjadi lebih mampu untuk menganalisis keadaannya sendiri, kemudian memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaannya, serta mengembangkan potensi-potensi dan ketrampilan mereka untuk meningkatkan kehidupan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat terjadi apabila perubahan perilaku masyarakat terjadi. Perubahan perilaku yang diharapkan oleh Metode PRA adalah perubahan perilaku yang membuat masyarakat kuat dan mandiri serta mengerti hak-hak dan kewajiban mereka.

- Pendidikan masyarakat sebagai pendidikan orang dewasa

Perubahan perilaku memerlukan pendidikan. Pengertian pendidikan disini tidaklah sama dengan pendidikan formal di sekolah, melainkan sebagai pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa melalui kegiatan bersama. Sesuai dengan prinsip PRA, 'orang luar' tidak bertindak sebagai 'guru', melainkan sebagai fasilitator belajar untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

- Dengan demikian, Metode PRA dikembangkan dengan dua tujuan utama, yaitu :

Tujuan praktis (Tujuan Jangka Pendek) adalah menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai sarana proses belajar tersebut.

Tujuan strategis (Tujuan Jangka Panjang) adalah membawa visi di atas yaitu mencapai Pemberdayaan Masyarakat dan Perubahan Sosial melalui pengembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembelajaran.

B. Implementasi Kebijakan

Banyak konsep implementasi kebijakan yang pernah dibahas oleh para ahli, salah satu di antaranya telah dikemukakan oleh Mater dan Horn (dalam Samodra Wibawa, 1994:15) telah mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok yang bermaksud untuk mencapai tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam kebijakan. Kegiatan implementasi ini baru dapat dilaksanakan setelah kebijakan mendapatkan pengesahan sari Legislatif termasuk alokasi sumberdaya.

Dari pendapat tersebut kiranya dapat dimengerti bahwa implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program. Adapun cara penyusunan program, menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Samondra Wibawa, 1994:16) harus melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah
2. Menetapkan tujuan yang akan dicapai

3. Merancang struktur proses implementasi

Program harus disusun secara jelas dan jika bersifat umum harus diterjemahkan secara lebih operasional dalam bentuk proyek. Kejelasan ini diperlukan karena dengan hanya kejelasan itulah akan diperoleh kriteria untuk dapat melakukan evaluasi administratif oleh birokrasi guna mentransformasi kebijakan menjadi kegiatan nyata.

Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan berfungsi membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan dapat direalisasikan sebagai *output* atau hasil kegiatan pemerintah. Karena itu implementasi menyangkut kreatifitas dari pelaksanaan kebijakan dimana alat-alat khusus di rancang dan dicari dalam mencapai tujuan tersebut. Di negara berkembang termasuk Indonesia, implementasi lebih menekankan pada perbedaan yang timbul dalam penetapan tujuan dengan *output* atau hasil, analisis implementasi kebijakan dalam penelitian akan menyajikan beberapa konsep implementasi kebijakan dari berbagai ahli yang akan dipergunakan sebagai acuan seperti :

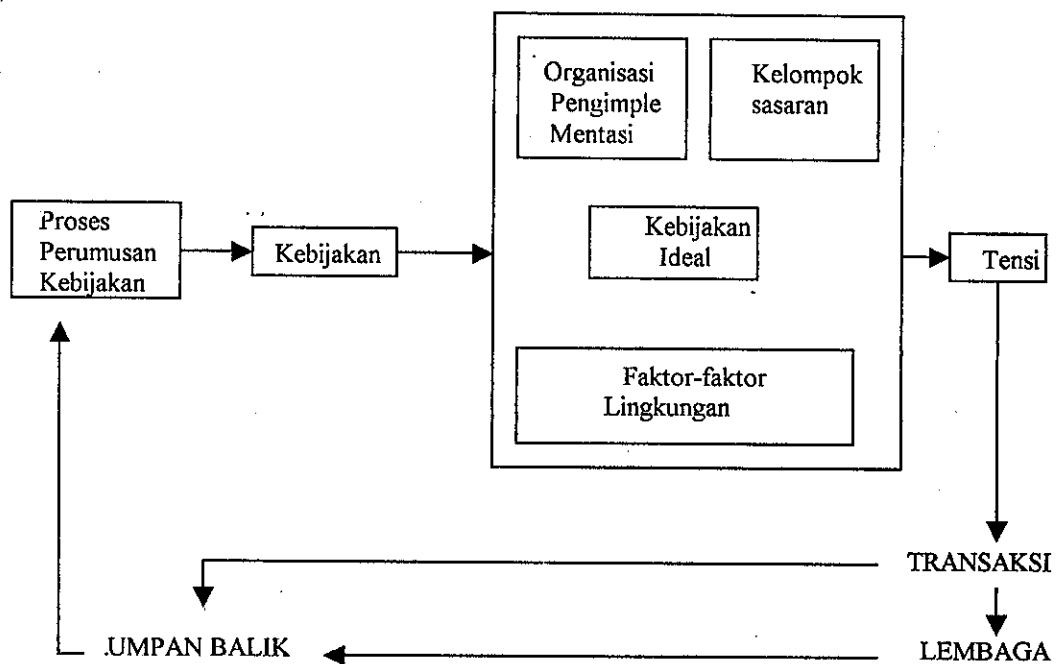
Quade (1984:310) dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasian, kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya suasana yang agak raemans (*tension*) dan kemudian diikuti tindak tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Selanjutnya Quade memberikan gambaran

bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam mengkaji implementasi kebijakan publik yaitu :

- a. Organisasi pengimplementator
- b. Kelompok sasaran
- c. Kebijakan
- d. Lingkungan.

Gambar. 2.3.

Proses Implementasi Quade



Sumber : Quade dalam proses implementasi kebijakan, 1984

Model Implementasi kebijakan Quade di atas menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat di pengaruhi oleh 4 (empat) vareabel yaitu variabel Organisasi Implementator, dimana implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik apabila organisasi sebagai implementator mempunyai kewenangan yang cukup, selain itu perlu dukungan

jumlah sumberdaya manusia yang memadai, teknologi atau alat yang dimiliki oleh organisasi tersebut harus memenuhi syarat atau memadai, dengan demikian apabila organisasi pengimplementator telah memenuhi syarat akan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selain faktor organisasi nampaknya perlunya kelompok sasaran dari kebijakan tersebut harus ditentukan secara jelas, karena kelompok sasaran inilah yang akan menerima dampak atau akibat dari kebijakan oleh sebab itu perlu dilibatkan agar dapat memberikan dukungan atau partisipasi. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah lingkungan baik politik, sosial dan budaya, interaksi dengan lingkungan ini sering menimbulkan dampak negatif untuk menolak karena tidak sesuai dengan kepentingan sehingga menimbulkan iklim yang kurang kondusif atau tensi yang tinggi. Selain itu kebijakan itu sendiri harus berjalan secara ideal, oleh karena itu perlu dilakukan bargaining/tawar-menawar untuk dapat diperoleh suatu kesepakatan sehingga tekanan rendah atau suasana yang kondusif, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konsep Quade keberhasilan implementasi kebijakan lebih mengkonsentrasi aspek kemampuan sumberdaya manusia, organisasi dan faktor lingkungan dalam mewujudkan strategi implementasi kebijakan.

Berbeda dengan konsep Grindle (dalam Samodra Wibawa, 1994:22-23) implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel yaitu *variabel konten dan variabel konteks*. Variabel konten apa yang ada dalam isi

suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi. Variabel konteks meliputi lingkungan dari kebijakan politik dan administratif dengan kebijakan publik tersebut.

Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

a. Isi kebijakan mencakup :

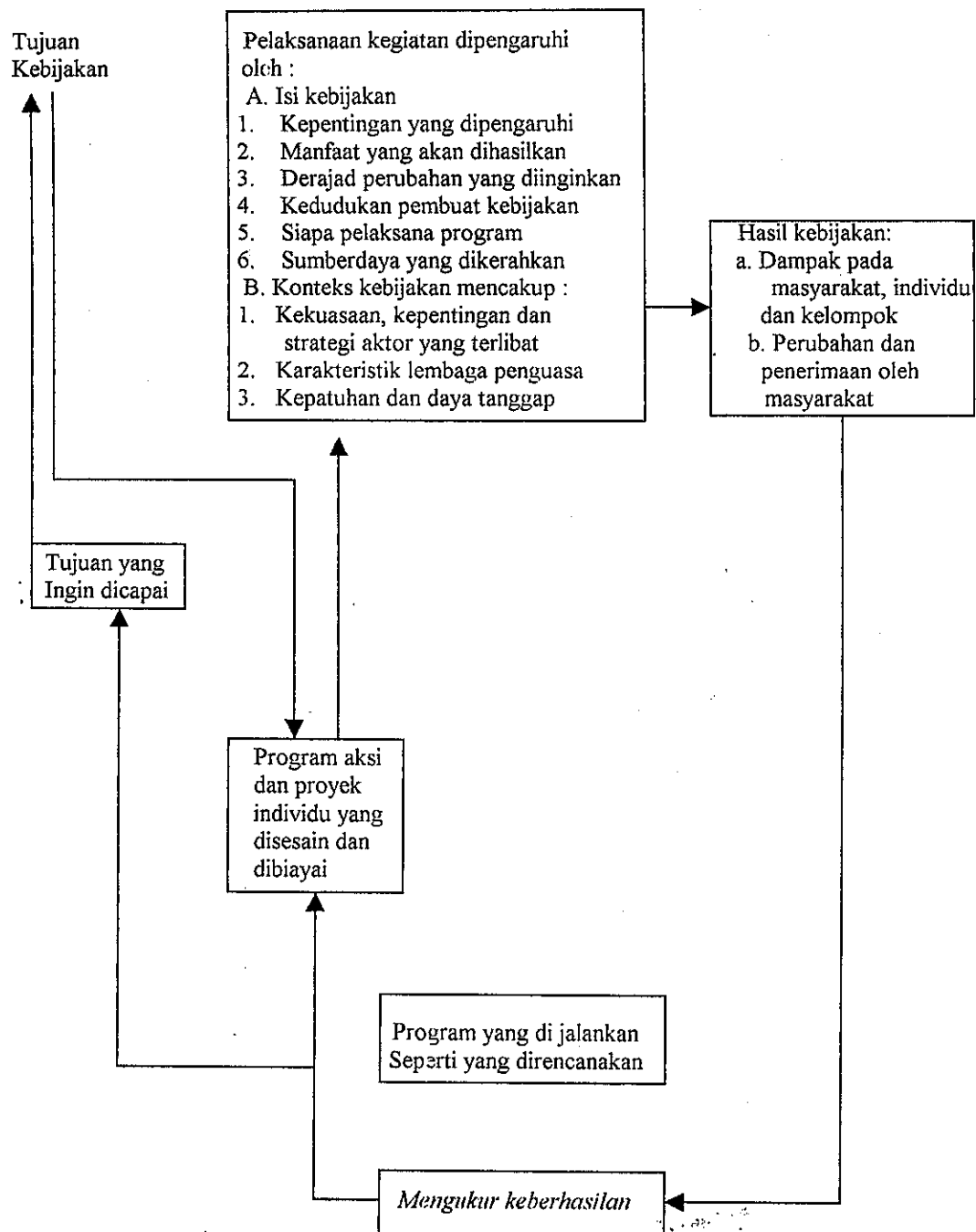
1. Kepentingan yang mempengaruhi
2. Manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

b. Konteks kebijakan mencakup :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model implementasi kebijakan Grindle digambar sebagaimana tersebut di bawah ini :

Gambar. 2.4
Model Implementasi Grindle



Sumber : Model implementasi Grindel dalam Samudra Wibawa, 1994.

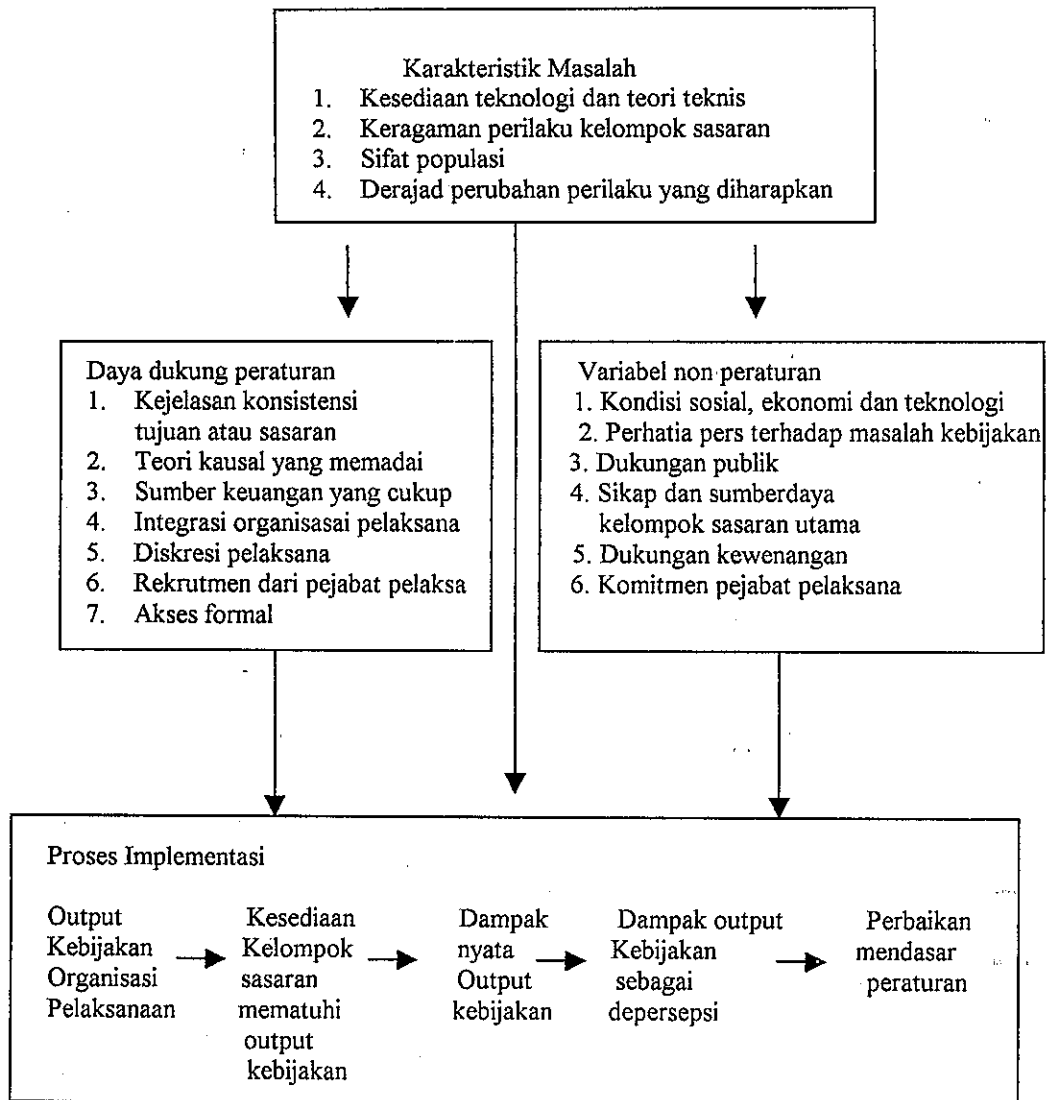
Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dikutip dari Sholichin Abdul Wahab, 1997:81) bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi. Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga antara lain :

1. Yaitu keberhasilan implementasi akan dapat ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan.
2. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Faktor-faktor di luar peraturan, yaitu pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Dan menurut pemikiran mereka, bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis), dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk menggerakkan sumberdaya. Model implementasi kebijakan dari Paul A Sabatier dan Daniel Mazmanian tersebut kita gambarkan sebagai berikut :

Gambar. 2.5

Model Implementasi Kebijakan



Sumber : Implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dikutip dari Sholihin Abdul wahab, 1997.

Dengan demikian implementasi kebijakan sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang cukup strategis dan bersifat ilmiah yang seharusnya dilakukan oleh para *decection maker* atau *stakehoulder* guna mendapatkan *policy outcome* yang diharapkan. Sehingga dengan melalui langkah studi

implementasi ini diharapkan dapat dijawab beberapa pertanyaan tentang mengapa setiap kegiatan yang ditargetkan belum/tidak dapat dicapai sesuatu standarisasi yang telah ditetapkan. Sebab implementasi merupakan suatu studi yang mempunyai arti luas, yaitu bagaimana menggunakan serangkaian metode penelitian ilmiah untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik. Dengan demikian studi implementasi biasanya berusaha untuk menangkap proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/efektifitas kebijakan dan kegagalan implementasi sehingga pada saatnya nanti kebijakan yang diformulasikan menjadi semakin berkualitas yang pada gilirannya kebijakan pemerintah tersebut memberi tingkat kepuasan yang bermakna bagi masyarakat publik ataupun pemerintah.

Dari beberapa pandangan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa untuk mengukur suatu keberhasilan suatu kebijakan publik dapat dikaji dalam 3 (tiga) perspektif yaitu :

1. Perspektif organisasi (*Quade*, 1984:310)

Perspektif ini lebih mengkonsentrasikan pada aspek kemampuan sumber daya manusia, organisasi dan faktor lingkungan dalam mewujudkan strategi implementasi kebijakan

2. Perspektif hasil/*outcome* (*Grindle*, 1994:22-23)

Menurut perspektif ini implementasi kebijakan dapat dinilai berhasil apabila kinerja kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif sesuai yang diinginkan oleh *client* atau masyarakat.

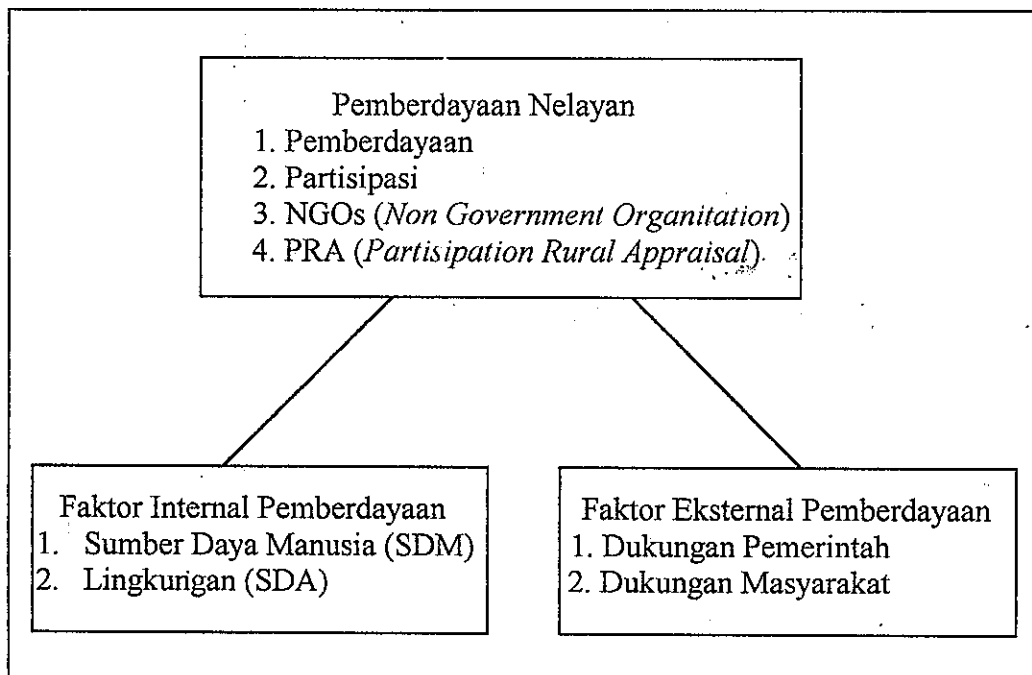
3. Prespektif proses/implementasi (Sebatier dan Mazmanian, 1997:81)

Menurut perspektif ini suatu kebijakan pemerintah dikatakan berhasil efektif kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan *policy guidelines* yang ditentukan (petunjuk pelaksanaan dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat kebijakan) yang mencakup antara lain cara pelaksanaannya, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat kebijakan.

Dari ketiga perspektif ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pokok bahasan yang esensial dalam kerangka kebijakan publik. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa implementasi kebijakan akan sangat ditentukan oleh ketiga domain utamanya adalah analisis organisasi, analisis prosedural dan analisis *outcome*.

Gambar. 2.6

Kerangka Pemikiran Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Di dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran metode yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001 : 3). Mengenai tehnik pendekatan kualitatif yaitu: "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". Selain itu penulis memperhatikan juga penyampaian dari Muhajir (1989:162) serta (Marzali,1980:14) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian melalui pengujian yang mendalam dan merinci dari suatu konteks, dari suatu obyek, dari suatu kumpulan dokumen atau dari suatu kejadian khusus, untuk mendapat pemahaman yang mendalam, holistik, mengabaikan representatif subyek peneliti terhadap responden, tidak menggunakan sampel besar, dan tidak dianalisa dengan angka secara statistik. Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran keadaan yang aktual dengan jalan mengumpulkan data berupa kata-kata, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikannya.

Dalam usaha memperoleh informasi, dilakukan usaha pengamatan atau observasi. Untuk menguji kebenaran suatu pengamatan, peneliti dituntut oleh suatu pengetahuan teori untuk dapat memberikan gambaran mengenai

kenyataan-kenyataan yang perlu diperhatikan. Penggambaran dari kenyataan-kenyataan (fakta) tersebut ditafsirkan menurut pandangan subyektif objek (orang yang diteliti). Bagaimana mereka memberikan makna pada kenyataan atau gejala itu menurut nilai-nilai mereka. Dalam konteks ini dapat ditangkap fakta atau faktor-faktor yang mempengaruhi Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini tidak bermaksud menguji suatu hipotesis, melainkan eksplorasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan. Serta mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kulon Progo. D.I. Yogyakarta. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan :

1. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu penerima Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
2. Karena penulis pernah menjadi Fasilitator Kecamatan (FK) pada Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

D. FENOMENA YANG DIAMATI

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan serta bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

E. JENIS DAN SUMBER DATA

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber data.

Adapun sumber data primer adalah :

1. Data Primer, diperoleh dari para nelayan di Kecamatan Panjatan dan Temon yang menerima bantuan proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir "PEMP", Kelompok Masyarakat Pemempaat "KMP" melalui wawancara.
2. Data Sekunder, diperoleh dari buku-buku literatur sebagai pendukung utama dalam penulisan ini. Data yang lain juga didapat dari sumber data dalam bentuk dokumen KMP (kelompok masyarakat pemanfaat) di Kecamatan Panjatan dan Temon, dan yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian dengan metode kualitatif menurut Sugiono (2001 : 4) yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Oleh karena peneliti sendiri-lah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian, serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Penggunaan peneliti sebagai instrumen peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang *valid* dan *reliable*. Namun dalam melaksanakannya, penelitian ini juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan maka peneliti akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian.

G. PEMILIHAN INFORMAN (SAMPEL)

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menunjuk langsung responden yang dikategorikan mampu memberikan informasi atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci (*key informan*) yang pengetahuan dan keterlibatan mereka dengan permasalahan penelitian tidak diragukan lagi.

Pemilihan responden atau informan secara *purposive* oleh peneliti didasarkan atas pertimbangan :

1. Mereka adalah masyarakat penerima proyek PEMP di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta.

2. Mereka mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran umum dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti.
3. Mereka adalah anggota kelompok masyarakat pemanfaat

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Ada dua aspek yang harus dipahami dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dan pencatatan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara (*Interview*), yaitu merekam persepsi dan opini informan, berkaitan dengan masalah atau fenomena penelitian, tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir "PEMP"

Sedangkan dalam pencatatan data meliputi dua jenis catatan :

1. Catatan yang berbentuk deskriptif, yaitu berisi uraian secara rinci dan komprehensif tentang fenomena yang akan diteliti.
2. Catatan reflektif, yaitu catatan yang menyangkut kesan, pendapat, tafsiran, gagasan, kecurigaan, serta tanda tanya yang muncul dalam pikiran peneliti terhadap informasi atau data yang diberikan oleh informan.

Untuk pencatatan data ini akan dilengkapi dengan lembar catatan data atau informasi.

I. TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian apapun adalah metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan, yaitu suatu alat untuk memperoleh pengertian tentang dunia samar atau dunia gelap yang masih belum seberapa dipahami (Sanapiah,

1990 : 88). Untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tersebut, diperlukan data/informasi, analisis data/informasi guna mengenali bagian-bagiannya, integrasi antar bagian dalam membentuk keseluruhan fenomena. Pengetahuan atau pengertian tersebut pada kenyataannya bersandar pada relasi antar simbol yang membentuk makna tertentu.

Untuk memperoleh makna tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induksi-konseptualisasi. Dengan pendekatan ini maka peneliti akan bertolak dari faktor/informasi empiris untuk membangun konsep.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domein. Teknik analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Dengan metode analisis domein ini peneliti akan menggunakannya untuk memperoleh gambaran menyeluruh faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan. Serta mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

BAB IV

DESKRIPSI KECAMATAN PANJATAN DAN KECAMATAN TEMON

A. Deskripsi Kecamatan Panjatan

A.1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Panjatan adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Panjatan adalah 4.459,2300 Ha atau sekitar 7,61 % dari luas Kabupaten Kulon Progo 58.627,5115 Ha dan terbagi atas 12 wilayah kecamatan. Kecamatan Panjatan terdiri dari 11 desa/kelurahan, 100 dusun/lingkungan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang jumlah dan luas wilayah desa di Kecamatan Panjatan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah dan Luas Wilayah Desa di Kecamatan Panjatan

Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Dusun	RW	RT	Keterangan
1. Garongan	623,94	9	18	36	
2. Pleret	646,28	11	22	44	
3. Bugel	642,32	10	20	43	
4. Kanoman	236,09	6	12	25	
5. Depok	282,68	11	22	44	
6. Bojong	370,33	11	22	44	
7. Tayuban	220,32	7	14	28	
8. Gotakan	354,99	8	16	22	
9. Panjatan	111,69	5	10	20	
10. Cerme	379,10	10	20	40	
11. Krembangan	591,49	12	24	48	
2001	4.459,23	100	200	404	

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2001.

Secara geografis Kecamatan Panjatan terletak di sebelah Selatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai ibukota Kabupaten dengan jarak tempuh \pm 4 km.

Secara administratif Kecamatan Panjatan berbatasan dengan :

- sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Pengasih
- sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sentolo dan Lendah
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wates.

Topografi Kecamatan Panjatan memiliki karakteristik datar sampai berombak, dan berada pada ketinggian 5,00 m diatas permukaan laut. Penggunaan lahan saat ini di Kecamatan Panjatan memperlihatkan bahwa sebagian besar masih didominasi areal tanah sawah dan tanah kering. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Luas Desa Dirinci Menurut Penggunaan Lahan di Kecamatan Panjatan (Ha)

Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Bangunan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Lainnya	Jumlah
1. Garongan	70,77	326,39	24,29	171,50	0,00	543,04	623,94
2. Pleret	130,50	313,26	33,63	100,00	0,00	567,46	646,28
3. Bugel	116,51	312,18	31,73	50,00	0,00	510,47	642,32
4. Kanoman	73,75	135,96	12,47	0,00	0,00	13,89	236,09
5. Depok	124,00	116,26	13,53	0,00	0,00	222,64	282,68
6. Bojong	150,00	179,30	25,65	0,00	0,00	345,41	370,33
7. Tayuban	56,32	103,11	15,32	0,00	0,00	170,17	220,32
8. Gotakan	113,45	194,24	15,15	0,00	0,00	322,84	354,99
9. Panjatan	39,26	49,76	11,13	0,00	0,00	100,15	111,69
10. Cerme	85,35	246,80	23,59	0,00	0,00	345,75	379,10
11. Krembangan	117,89	399,55	31,38	0,00	0,00	548,82	591,49
2001	1.077,30	2.376,81	237,87	321,50	0,00	3.690,64	4.459,23

Sumber Data : Mantri Statistik Kecamatan Panjatan Kab. Kulon Progo, 2001.

Wilayah Kecamatan Panjatan beriklim laut tropis, suhu rata-rata mencapai suhu terendah 22° C dan suhu tertinggi 32° C. Curah hujan per jumlah hari hujan 53, rata-rata curah hujan 460,9 mm.

Dari gambaran umum secara geografis di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Panjatan mempunyai posisi yang strategis untuk dikembangkan lebih lanjut. Disamping itu Kecamatan Panjatan mempunyai jarak yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten Kulon Progo dan berada pada jalur selatan yang menghubungkan dengan daerah-daerah lain.

Selain faktor letak tersebut, Kecamatan Panjatan mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan antara lain pertanian, kehutanan, kelautan dan pariwisata. Apabila semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kecamatan Panjatan dengan luas seluruhnya 4.459,2300 Ha memiliki potensi sumber daya alam yang cukup luas untuk dikembangkan antara lain:

- a. Penggunaan tanah sawah, adalah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman padi dan atau tanaman semusim lainnya dengan dicirikan pemanfaatan air irigasi teknis 435,0289 Ha, irigasi setengah teknis 344,4184 Ha, irigasi sederhana 42,2070 Ha, tanah hujan atau sawah rendeng 245,4129 Ha. Dengan luas keseluruhan pemanfaatan irigasi seluas 1.067,0672 Ha.

- b. Pertanian lahan kering, adalah lahan yang dipergunakan untuk budidaya tanaman pangan semusim atau tanaman tahunan yang dicirikan dalam pengelolaannya tidak memerlukan irigasi. Pekarangan dan bangunan 237,1165 Ha dan tanah ladang atau huma 2.407,2616 Ha. Luas keseluruhan lahan kering adalah 2.644,3781 Ha.
- c. Tanah basah atau Perikanan, yaitu lahan yang dipergunakan untuk budidaya Perikanan baik berupa tambak maupun kolam air tawar, luas lahan yang dipergunakan adalah 0,5400 Ha yang hanya berupa kolam air tawar dan tambak.
- d. Perkebunan, yaitu lahan yang dibudidayakan untuk tanaman perkebunan baik perkebunan negara atau perkebunan swasta. Tercatat perkebunan yang dimiliki swasta seluas 321,5000 Ha sedangkan perkebunan negara tidak ada.
- e. Areal hutan, yaitu keseluruhan lahan yang ditumbuhi tanaman hutan, baik terletak di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, baik hutan negara, hutan wisata dan hutan Rakyat/milik di Kecamatan Panjatan tidak ada.
- f. Tanah keperluan fasilitas, yaitu lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum antara lain lapangan olahraga 7,5562 Ha, taman rekreasi 0 Ha, jalur hijau 0 Ha, dan Kuburan 10,3870 Ha.
- g. Tanah lain-lain, yaitu tanah tandus/pasir luas keseluruhan 407,8015 Ha.

Dari gambaran umum geografis di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Panjatan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini juga didukung oleh jarak yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten Kulon Progo

serta dilalui jalur lalu lintas Selatan yang menghubungkan kota-kota yang berada di Selatan Pulau Jawa.

A.3. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Panjatan pada tahun 2001 mencapai jumlah 38.899 jiwa, yang terdiri dari 18.858 jiwa laki-laki dan 20.041 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 883 jiwa/km², penyebaran penduduk merata.

Secara lebih lengkap mengenai perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Panjatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Panjatan Tahun 2001

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Garongan	1.703	1.790	3.493
2. Pleret	2.473	2.549	5.022
3. Bugel	2.055	2.252	4.307
4. Kanoman	1.261	1.387	2.648
5. Depok	1.661	1.52	3.213
6. Bojong	2.237	2.333	4.570
7. Tayuban	1.164	1.380	2.544
8. Gotakan	1.464	1.598	3.062
9. Panjatan	843	877	1.720
10. Cerme	1.762	1.882	3.644
11. Krembangan	2.235	2.441	4.676
2001	18.858	20.041	38.899

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2001.

Keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Panjatan yang tertuang dalam tabel tersebut di atas, kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia, tidak ada Warga negara keturunan atau Warga negara asing.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh PPLKB Kecamatan Panjatan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Panjatan masih tingginya pra keluarga sejahtera. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Banyaknya Kepala Keluarga Menurut Tahapan Keluarga
di Kecamatan Panjatan Tahun 2001

Desa	Pra Keluarga Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Keluarga Sejahtera II	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Garongan	289	38,48	143	19,04	73	9,72
2. Pleret	426	43,16	247	25,03	85	8,61
3. Bugel	701	66,83	211	20,11	70	6,67
4. Kanoman	322	54,48	140	23,69	76	12,86
5. Depok	301	44,86	84	12,52	41	6,11
6. Bojong	252	26,75	163	17,30	176	18,68
7. Tayuban	231	43,26	122	22,85	96	17,98
8. Gotakan	351	53,26	219	33,23	60	9,10
9. Panjatan	76	23,10	111	33,74	39	11,85
10. Cerme	494	61,98	143	17,94	42	5,27
11. Krembangan	579	53,46	177	16,34	109	10,06
2001	4.022	47,92	176	20,97	867	10,33

Sumber Data : PPLKB Kecamatan Panjatan Kab. Kulon Progo, 2001.

Apabila kesejahteraan masyarakat Kecamatan Panjatan membaik tentunya ini merupakan hal yang menggembirakan mengingat sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Keadaan penduduk selain diperlukan dalam kegiatan proses produksi, juga sekaligus sebagai pasar dari hasil-hasil produksi daerah. Namun demikian pertumbuhan penduduk tidak jarang menimbulkan masalah yang serius bagi pembangunan ekonomi daerah. Jumlah penduduk yang bertambah akan menyerap

sebagian besar dana pemerintah untuk keperluan penciptaan fasilitas-fasilitas sosial seperti kesehatan, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Besarnya peranan penduduk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Potensi penduduk tidak akan termanfaatkan secara optimal apabila lapangan kerja yang tersedia di daerah belum bisa menyerap tenaga kerja yang tersedia dengan produktivitas yang maksimal. Demikian pula struktur penduduk yang relatif muda, mengakibatkan banyak penduduk pada usia non produktif.

B. Deskripsi Kecamatan Temon

1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Temon adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Temon adalah 3.629,0890 Ha atau sekitar 6,19 % dari luas Kabupaten Kulon Progo 58.627,5115 Ha dan terbagi atas 12 wilayah kecamatan. Kecamatan Temon terdiri dari 30 desa/kelurahan, 96 dusun/lingkungan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.5 tentang jumlah dan luas wilayah desa di Kecamatan Temon sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah dan Luas Wilayah Desa di Kecamatan Temon

Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Dusun	RW	RT	Keterangan
Jangkar	365,64	8	10	27	
Sindutan	297,80	7	14	28	
Palihan	358,71	9	15	35	
Glagah	603,94	9	16	36	
Kalidengen	150,75	3	7	14	
Plumbon	303,68	10	12	26	
Kedundang	139,02	8	12	28	
Demen	97,54	7	7	21	
Pulur	279,75	7	14	15	
Kaligintung	218,66	5	9	29	
Temon Wetan	222,69	7	13	27	
Temon Kulon	155,71	5	11	32	
Kebon Rejo	172,45	4	9	21	
Janten	133,11	5	9	19	
Karangwuluh	129,64	4	8	16	
2001	3.629,0890	96	166	404	

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo,2001

Secara geografis Kecamatan Temon terletak di sebelah Selatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai ibukota kabupaten dengan jarak tempuh \pm 9 km. Secara administratif Kecamatan Temon berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kokap
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Pengasih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

Topografi Kecamatan Temon memiliki karakteristik datar sampai berombak 75 %, berombak sampai berbukit 15 %, berbukit sampai bergunung 10 %, dan berada pada ketinggian 6 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan saat ini di Kecamatan Temon memperlihatkan bahwa sebagian besar masih didominasi areal tanah sawah dan tanah kering. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Luas Desa Dirinci Menurut Penggunaan Lahan di Kecamatan Temon (Ha)

Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Bangunan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Lainnya	Jumlah
Jangkaran	40,00	71,72	35,21	0,00	0,00	212,71	365,64
Sindutan	129,37	120,00	18,84	0,00	0,00	29,59	297,80
Palihan	92,06	146,67	32,83	0,00	0,00	87,15	358,71
Glagah	164,45	144,22	113,62	0,00	0,00	181,65	603,94
Kalidengen	82,70	48,88	12,61	0,00	0,00	6,56	150,75
Plumbon	193,60	73,77	28,00	0,00	0,00	8,31	303,68
Kedundang	61,65	55,39	12,38	0,00	0,00	9,60	139,02
Demen	48,54	34,61	9,35	0,00	0,00	5,04	97,54
Pulur	51,34	165,76	53,48	0,00	0,00	9,17	279,75
Kaligintung	65,54	92,23	27,10	0,00	0,00	29,79	218,66
Temon Wetan	59,39	135,05	23,94	0,00	0,00	4,31	222,69
Temon Kulon	90,00	45,36	14,49	0,00	0,00	5,86	155,71
Kebon Rejo	84,51	63,22	11,26	0,00	0,00	13,46	172,45
Janten	75,42	36,10	9,12	0,00	0,00	12,47	133,11
Karangwuluh	82,53	26,14	11,15	0,00	0,00	9,82	129,64
2001	1.327,10	1.263,12	412,38	0,00	0,00	625,49	3.629,09

Sumber Data : Mantri Statistik Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo, 2001.

Wilayah Kecamatan Temon beriklim laut tropis, suhu rata-rata mencapai suhu terendah 20° C dan suhu tertinggi 35° C. Curah hujan per jumlah hari hujan 43, rata-rata curah hujan 1530,5 mm/Th.

Dari gambaran umum secara geografis di atas, serta posisi Kecamatan Temon yang berdekatan dengan Kabupate Purworejo yang berada pada kawasan propinsi Jawa Tengah hal ini sangat menunjang dalam pengembangan perekonomian. Disamping itu Kecamatan Temon mempunyai jarak yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten Kulon Progo dan berada pada jalur selatan yang menghubungkan dengan daerah-daerah lain.

Kecamatan Temon mempunyai potensi sumber daya kelautan dan pariwisata yang dapat dikembangkan terutama pengembangan pariwisata pantai Glagah dengan akan dikembangkannya pantai Glagah dengan pembuatan lapangan golf yang hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Apabila semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Kecamatan Temon dengan luas seluruhnya 3.629,0890 Ha memiliki potensi sumber daya alam yang cukup luas untuk dikembangkan antara lain:

- a. Penggunaan tanah sawah, adalah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman padi dan atau tanaman semusim lainnya dengan dicirikan pemanfaatan air irigasi teknis 1.352,1212 Ha, irigasi setengah teknis 1.258,0000 Ha, irigasi sederhana 0 Ha, tanah hujan atau sawah rendeng 94,1212 Ha. Dengan luas keseluruhan pemanfaatan irigasi seluas 2.704,2424 Ha.

- b. Pertanian lahan kering, adalah lahan yang dipergunakan untuk budidaya tanaman pangan semusim atau tanaman tahunan yang dicirikan dalam pengelolaannya tidak memerlukan irigasi. Pekarangan dan bangunan 1.139,1880 Ha dan tanah ladang atau huma 0 Ha, tegal/kebun 533,4663 Ha. Luas keseluruhan lahan kering adalah 1.672,6463 Ha.
- c. Tanah basah atau Perikanan, yaitu lahan yang dipergunakan untuk budidaya Perikanan baik berupa tambak maupun kolam air tawar, luas lahan yang dipergunakan adalah 0 Ha.
- d. Perkebunan, yaitu lahan yang dibudidayakan untuk tanaman perkebunan baik perkebunan negara atau perkebunan swasta. Tercatat tidak ada perkebunan yang dimiliki swasta maupun negara.
- e. Areal hutan, yaitu keseluruhan lahan yang ditumbuhi tanaman hutan, baik terletak di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, baik hutan negara, hutan wisata dan hutan Rakyat/milik di Kecamatan Temon tidak ada.
- f. Tanah keperluan fasilitas, yaitu lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum antara lain lapangan olahraga 6,2376 Ha, taman rekreasi 0 Ha, jalur hijau 20,9895 Ha, dan Kuburan 10 Ha.
- g. Tanah lain-lain, yaitu tanah tandus/pasir luas keseluruhan 577,0994 Ha.

Dari gambaran umum geografis di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Temon mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini juga didukung oleh jarak yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten Kulon Progo serta dilalui jalur lalu lintas Selatan yang menghubungkan kota-kota yang berada di Selatan Pulau Jawa.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Temon pada tahun 2001 mencapai jumlah 31.256 jiwa, yang terdiri dari 15.102 jiwa laki-laki dan 16.154 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 0 jiwa/km², penyebaran penduduk merata.

Secara lebih lengkap mengenai perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Temon dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Temon Tahun 2001

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jangkaran	278	73	351
Sindutan	404	110	514
Palihan	381	103	484
Glagah	524	79	603
Kalidengen	213	62	275
Plumbon	480	112	592
Kedundang	405	121	527
Demem	264	54	318
Pulur	504	159	663
Kaligintung	308	86	394
Temon Wetan	297	104	401
Temon Kulon	312	95	407
Kebon Rejo	292	72	364
Janten	248	62	310
Karangwuluh	203	61	274
2001	5.124	1.353	6.477

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2001.

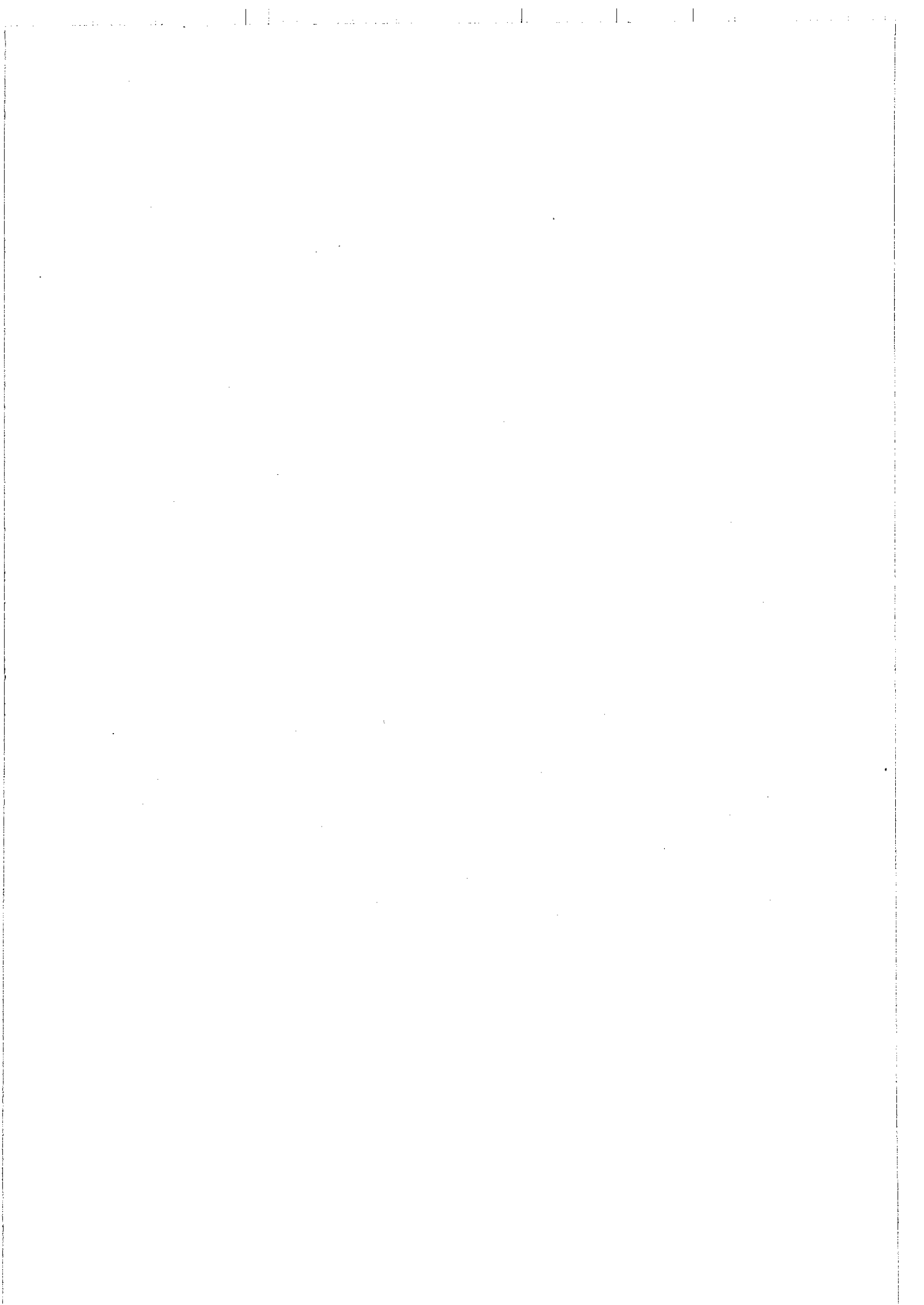
Keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Temon yang tertuang dalam tabel tersebut di atas, kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia, tidak ada Warga negara keturunan atau Warga negara asing.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh PPLKB Kecamatan Temon menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Temon masih tingginya pra keluarga sejahtera. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Banyaknya Kepala Keluarga Menurut Tahapan Keluarga
di Kecamatan Temon Tahun 2001

Desa	Pra Keluarga Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Keluarga Sejahtera II	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jangkaran	89	20,60	72	16,67	51	11,86
Sindutan	131	26,52	105	21,26	140	28,95
Palihan	143	26,93	105	19,77	106	19,96
Clagah	111	16,76	133	20,09	122	18,42
Kalidengen	47	14,42	121	37,12	89	27,32
Plumbon	57	9,13	70	11,22	256	41,03
Kedundang	114	20,84	100	18,26	64	11,70
Demen	22	6,67	110	33,33	54	16,36
Pulur	189	27,23	178	25,65	98	14,12
Kaligintung	144	31,65	91	20,00	101	22,20
Temon Wetan	77	19,12	44	10,35	147	34,59
Temon Kulon	76	17,12	87	19,59	80	18,02
Kebon Rejo	29	7,49	117	30,23	21	5,43
Janten	32	10,39	104	33,77	118	38,31
Karangwuluh	44	18,18	48	19,84	0	0
2001	1.305	18,91	1.485	21,52	1.450	21,01

Sumber Data : PPLKB Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo, 2001.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL

A. Identitas Responden

Seperti yang diuraikan penulis pada Bab III bahwa responden dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan yang menerima bantuan Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di daerah Kabupaten Kulon Progo. Melalui responden tersebut penulis mendapatkan data primer yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi wawancara mendalam dilakukan secara (*purposive*) dengan para informan, yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan.

Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah, pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.

Pemilihan informan yang akan diwawancarai di samping ditentukan oleh peneliti secara (*purposive*), juga dilakukan secara (*snow ball*), yaitu melalui informasi yang diberikan oleh informan yang sudah diwawancarai sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh melalui sistem ini adalah peneliti tidak menemui banyak kesulitan. Untuk menentukan informan yang akan diwawancarai, karena

1

data mengenai siapa saja yang dianggap bisa memberi informasi tentang permasalahan yang diteliti sudah disediakan para informan sebelumnya.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Data-data Responden (Informan)

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1.	Parji M. Utomo	53 Tahun	SLTP	Dukuh I	Tani/Nelayan	KMP Bugel Peni
2.	Eko Heri Wahyono	36 Tahun	SMA	Dukuh I	Wiraswasta/ Nelayan	KMP Bugel Peni
3.	Sarjiyo	36 Tahun	SMA	Dukuh I	Wiraswasta/ Nelayan	KMP Bugel Peni
4.	Imam Wakhidi	52 Tahun	SD	Bayeman	Tani/Nelayan	KMP Arung Samudra
5.	Riyadi	42 Tahun	SLTA	Bayeman	Tani/Nelayan	KMP Arung/ Samudra
6.	Agus Salim	37 Tahun	SLTA	Bayeman	Pamong Desa	KMP Arung Samudra
7.	Marsono	32 Tahun	SLTP	Dukuh II Garongan	Tani/Nelayan	KMP Minatirto
8.	Bambang AP	40 Tahun	D3	Sengkretan Glagah	PNS	KMP Ngudi Mulya
9.	Marsudi	36 Tahun	SLTA	Glagah	Tani/Nelayan	KMP Ngudi Mulya
10.	Budiarto	33 Tahun	SLTA	Glagah	Tani/Nelayan	KMP Ngudi Mulya

Selain informan tersebut di atas, penulis juga melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan di setiap daerah penelitian,

dan melihat secara langsung kegiatan kenelayanan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, sejauh yang dapat dilihat, serta untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diungkapkan melalui wawancara.

Untuk melengkapi data primer, pengumpulan data sekunder juga dilakukan di instansi-instansi terkait, yaitu:

1. Dinas Pertanian dan Kelautan
2. Koperasi Unit Desa (KUD)
3. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Pusat Pendaratan Ikan (PPI)
5. Lembaga-lembaga penggerak swadaya masyarakat (LSM)

Data sekunder ini di samping berguna untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam komunitas nelayan, juga dapat dikembangkan mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang intensif.

B. Lokasi dan Hasil Penelitian

B.1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian terutama didasarkan pada kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan. Untuk itu dipilih dua kecamatan, yaitu Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon sebagai representasi dari Kabupaten Kulon Progo yang berada di wilayah Pantai Selatan.

Pemilihan lokasi di dua kecamatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi masyarakat dari kedua kecamatan berbeda. Walaupun berada di wilayah Pantai Selatan. Perbedaan itu adalah di samping wilayah Pantai Selatan lebih luas dan terbuka dibandingkan Pantai Utara, juga potensi sumber daya Perikanan yang tersedia diperkirakan lebih besar di wilayah Pantai Selatan. Dengan perbedaan masyarakat itulah maka diperkirakan akan terdapat perbedaan upaya yang dilakukan oleh kedua masyarakat tersebut dalam memberdayakan dirinya.

Penelitian di Kecamatan Panjatan dipilih secara purposif dua desa yang berbeda, yaitu Desa Bugel dan Desa Garongan. Sementara di Kecamatan Temon dipilih juga dua desa, yaitu Desa Glagah dan Desa Sindutan. Pemilihan wilayah di setiap daerah didasarkan pada pertimbangan perbedaan tingkat keberdayaan masyarakatnya. Untuk mengetahui tingkat keberdayaan itu pada tahap awal selain diindikasikan oleh kondisi fisik perumahan masyarakatnya, juga dilihat dari proporsi jumlah pemilikan sarana perikanan dan hasil produksi perikanan.

B.2: Hasil Penelitian

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini penulis akan paparkan secara deskriptif kualitatif. Meskipun demikian data kuantitatif yang relevan tetap diperlukan sejauh bermanfaat untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan pemberdayaan.

B.2.1. Konsep Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empowerment*”, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Dari 10 orang responden, yang mengetahui adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kulon Progo ada 8 responden (80%), sedangkan 2 orang responden (20%) mengatakan tidak mengetahui. Atas pertanyaan apakah dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon mereka merasakan manfaat dan keuntungan, sebagian responden (80%) mengatakan mereka merasakan ada manfaat dan keuntungannya yaitu mendapatkan modal usaha seperti dikatakan beberapa anggota kelompok masyarakat pemanfaat (KMP), Marsudi, Budiarto, Marsono dan Bambang A.P serta lainnya mengatakan bahwa :

“...Dengan adanya bantuan modal dari proyek PEMP dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menambah modal usaha” (wawancara tanggal 28 Juni sampai dengan 12 Juli 2003.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moelyarto, 1996 dalam Wahyono et.al. (2001:9).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resources management*), yang merupakan mekanisme perencanaan (*people-centered development*) yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan (KMP) dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Hal ini disampaikan oleh Bambang A.P yang mengatakan:

“...Pemberdayaan adalah membantu masyarakat ekonomi lemah agar ikut berperan dalam pembangunan serta masyarakat tidak dijadikan obyek tapi menjadi subyek atau pelaku pembangunan” (wawancara tanggal 1 Juli 2003).

Dalam kaitan ini, Moelyarto (1999) dalam Wahyono et.al (2001:9) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, yang meliputi:

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan
2. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam menggerakkan aset-aset yang ada dalam masyarakat.
3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.

4. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonomi dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonomi dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya, yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya setempat.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan (KMP) terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelola lokal (*community-based resource management*). Pentingnya memperhatikan aspek strategi adaptasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut adalah karena strategi adaptasi yang dikembangkan memungkinkan nelayan mengatur daya tahan (*resilience*) terhadap persoalan-persoalan spesifik kenelayan yang dihadapi, seperti fluktuasi, ketidakpastian hasil tangkapan, atau menurunnya sumber daya perikanan. Hal ini dikemukakan oleh Bambang A.P dan Marsudi yang mengatakan:

“...Karena musim ikan ada masa pacekliknya, berawal pada bulan Oktober berakhir bulan Februari, karena pada saat itu pantai selatan berombak dan arus sangat kuat. Oleh sebab itu harus disikapi dengan adanya pasca panen pada saat tangkapan melimpah dengan membuat ikan asin yang harga jualnya pada masa paceklik sangat tinggi” (wawancara tanggal 1 Juli dan 4 Juli 2003).

Strategi adaptasi itu dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu diversifikasi dan intensifikasi. Diversifikasi merupakan perluasan alternatif pilihan mata pencaharian yang dilakukan nelayan, baik di bidang perikanan maupun non perikanan, sebagaimana dikatakan Mc Cay (1978) dalam Wahyono et.al (2001:12)

“diversification involved the broadening of alternatif, both fishing and out in fishing and others modes of making a living”.

Diversifikasi merupakan strategi adaptasi yang umum dilakukan di banyak komunitas nelayan, dan sifatnya masih tradisional. Strategi adaptasi ini dicirikan oleh bentuk-bentuk respon Penyesuaian yang sifatnya masih individual atau dilakukan oleh unit rumah tangga nelayan.

Bentuk strategi adaptasi yang lain adalah intensifikasi yang merupakan strategi adaptasi yang tumbuh di kalangan nelayan untuk melakukan investasi pada teknologi penangkapan, sehingga hasil tangkapannya diharapkan menjadi lebih banyak. Untuk itu, melalui intensifikasi maka kegiatan penangkapan dapat dilakukan pada daerah tangkapan yang jauh dari tempat pemukiman, bahkan memerlukan waktu penangkapan lebih dari satu hari (*one day fishing*).

Kedua bentuk strategi adaptasi tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan. Diversifikasi adalah strategi adaptasi yang pada awalnya dikembangkan nelayan secara individual atau dalam skala rumah tangga nelayan. Menurut Mc Cay, proses perubahan respon dari yang sifatnya diversifikasi ke bentuk

intensifikasi dapat dilihat sebagai perkembangan pilihan-pilihan tindakan adaptasi yang sifatnya individual, menuju pada pilihan tindakan adaptasi yang bersifat kelompok. Sebagai contoh adalah sejumlah orang bergabung membentuk kumpulan atau kelompok nelayan (*purse sine*), atau membentuk organisasi Koperasi.

Dengan konsep pemberdayaan masyarakat pesisir (KMP), nelayan sebagai kontrol dari masyarakat dapat digunakan sebagai suatu penilaian terhadap baik atau tidaknya konsep pemberdayaan tersebut. Dalam penelitian ini kontrol masyarakat nelayan ditujukan sebagai persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Pesisir di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon. Persepsi masyarakat nelayan tersebut berkaitan dengan fenomena-fenomena kualitas pemberdayaan dapat penulis ketahui dari hasil wawancara penulis dengan kelompok masyarakat pemanfaat KMP yang penulis anggap sebagai (*key informant*), yang identitasnya telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun fenomena pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di kabupaten Kulon Progo, yang berlokasi di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon yang penulis amati adalah sebagai berikut:

B.2.2. Pemberdayaan

Pemberdayaan mengandung pengertian “pembaharuan” menuju perbaikan. Termasuk di dalamnya pembaharuan mental, fisik dan sistem kelembagaan yang selama ini dirasakan statis dan mapan. Dan perlu dimaklumi bahwa setiap

pembaharuan memerlukan energi, baik yang ada di dalam masyarakat maupun energi yang dimasukkan ke dalam sistem masyarakat. Energi yang bersifat potensial harus dibangkitkan secara sinergi untuk melakukan pembaharuan, agar mencapai hasil yang diharapkan. Energi tersebut harus dikelola secara sistematis agar mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan.

Memberdayakan masyarakat tidaklah sama seperti pembangunan infrastruktur dan tidak sama pula dengan membangun sumber daya manusia melalui kegiatan formal di sekolah. Memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat pesisir "nelayan" (KMP) dan pedesaan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah bukanlah masalah yang sederhana dan mudah dikerjakan, tetapi merupakan hajat besar yang memerlukan partisipasi semua komponen yang peduli dan atau berkepentingan dengan pemberdayaan manusia, terutama masyarakat itu sendiri.

Banyak terjadi dan ini terjadi pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (KMP), pemberdayaan masyarakat menjadi salah sasaran. Sasaran terdistorsi karena mengejar keberhasilan proyek dan keberhasilan proyek diindikasikan oleh adanya aktivitas yang dapat dilihat dan diukur secara fisik. Padahal proses pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah mencapai perubahan sikap dan perilaku untuk menjadi lebih baik. Dan bagi masyarakat yang sedang berubah, naik turunnya aktivitas adalah biasa karena mereka dalam proses Penyesuaian dari sikap lama menjadi sikap baru. Dan naik turunnya tergantung dari energi yang tersedia di masyarakat dan energi yang dimasukkan. Yang sering terjadi adalah kembalinya sikap dan perilaku lama, bahkan tidak

jarang semakin buruk karena tercemar oleh sistem proyek yang temporer dan mengejar pencapaian target fisik sehingga persepsi masyarakat terhadap bantuan adalah rejeki yang datang dari langit dan tidak punya implikasi resiko terhadap kehidupan. Pada akhirnya proyek berarti menciptakan ketergantungan masyarakat nelayan (KMP) terhadap bantuan, terlebih yang datang dari pemerintah. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian kita bersama, termasuk komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan miskin (KMP) bahwa pemberdayaan itu memerlukan energi yang besar dan dapat berakibat lebih buruk jika kita salah "urus" pemberdayaan sangat memerlukan konsistensi semangat yang tinggi untuk tidak putus asa.

Meskipun tidak semua nelayan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya "miskin", tetapi bisa dikatakan bahwa pada umumnya nelayan termasuk kelompok masyarakat yang seperti itu. Ketidak berdayaan nelayan tidak saja dialami oleh para buruh, tetapi sebenarnya juga oleh para pemilik alat tangkap, karena pada umumnya masih tergantung pada alat tangkapannya. Jadi, baik nelayan buruh maupun nelayan pemilik bergantung dalam usahanya untuk memiliki alat tangkap, bahkan kadang-kadang juga untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, maka nelayan buruh sangat bergantung pada juragannya "nelayan pemilik".

Ketidak berdayaan nelayan juga disebabkan oleh usaha mereka yang sangat bergantung pada alam, yang penuh dengan ketidakpastian (uncertainty). Dengan tergantung pada kondisi alam yang tidak menentu, maka hasil

tangkapannya juga tidak menentu. Hal ini dikeluhkan oleh Bambang A.P dan marsudi dengan ungkapan :

“...Masyarakat jangan hanya tergantung pada laut tetapi disamping itu juga harus bertani, agar pada saat paceklik laut masyarakat nelayan ada pekerjaan sampingan sebagai petani” (wawancara tanggal 1 Juli dan 4 Juli 2003).

Dengan Ketidak berdayaan yang dialami maka para nelayan berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatannya. Berbagai cara yang ditempuh antara lain adalah berusaha untuk meningkatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta mencari peluang pasar yang lebih menguntungkan.

Permasalahan Ketidak berdayaan nelayan muncul karena adanya pandangan bahwa masyarakat nelayan (KMP) itu miskin. Walaupun kenyataannya tidak selalu demikian, karena ada sebagian masyarakat nelayan (KMP) yang hidupnya tampak berkecukupan, namun untuk dikatakan bahwa mereka sudah mampu hidup mandiri tanpa bantuan orang lain, tampaknya masih jauh dari harapan. Oleh karena itulah pandangan tentang Ketidak berdayaan nelayan kemudian berkembang menjadi usaha untuk memperbaiki kehidupan nelayan.

Sementara dari komunitas nelayan itu sendiri, terdapat semacam kesadaran dari mereka bahwa kehidupan nelayan sangat rentan, terutama jika dilihat dari segi pendapatan. Ini diakui oleh beberapa nelayan dengan pernyataan bahwa tidak ada jaminan terhadap hasil yang diperoleh (wawancara tanggal 4 Juli 2003). Memang suatu saat seorang nelayan dapat memperoleh hasil yang cukup besar, bahkan sebagaimana yang diakui oleh seorang nelayan (Pak Imam dalam wawancara tanggal 5 Juli 2003), bahwa satu kali operasi bisa mendapat hasil yang

banyak namun tidak jarang dalam beberapa kali operasi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sebagaimana dikemukakan oleh seorang nelayan yang lain, pada saat penelitian ini dilakukan sudah satu minggu tidak melaut, karena memang di laut sedang tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Menurut penuturannya, sudah sekitar satu bulan sebelumnya sangat sulit untuk mendapatkan ikan.

Dalam kondisi pendapatan yang rentan itulah maka nelayan berusaha untuk memberdayakan dirinya melalui berbagai cara. Cara-cara itu walaupun tidak mampu menghapuskan kerentanan yang dialami, namun paling tidak diharapkan dapat meminimalkan tingkat kerentanan. Cara pertama yang dilakukan oleh para nelayan Kabupaten Kulon Progo khususnya nelayan Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon dalam mengatasi Ketidakberdayaan dan kerentanan ekonomi adalah melalui usaha *intensifikasi* kenelayanan, dengan cara memperbesar daya eksploitasi alat tangkap yang dimilikinya. Selain itu untukantisipasi terhadap musim juga melakukan *diversifikasi* alat tangkap dan usaha di luar penangkapan, seperti usaha pengolahan pasca panen. Adapun untuk meningkatkan daya eksploitasi menggunakan sarana transportasi yang lebih (*mobile*).

B.2.3. Partisipasi

Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Pamong desa Sindutan, Agus Salim mengungkapkan sebagai berikut :

“...Partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam pemberdayaan apapun bentuknya, baik pemberdayaan masyarakat nelayan, pemberdayaan wanita, pemberdayaan petani dan sebagainya kalau tidak didukung oleh masyarakat atau tidak ada partisipasi masyarakat maka program tersebut pasti gagal” (wawancara tanggal 7 Juli 2003).

Dalam penelitiannya Uma Lele terhadap proyek-proyek pembangunan pedesaan di Afrika menemukan bahwa partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang amat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian (*self reliance*) yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan (Uma Lele 1975:150).

Begitu juga Conyers (dalam Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Supriatna) mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat atau lebih mempercayai proyek atau proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Sedangkan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, menurut Cohen dan Uphoff (1977:8), partisipasi terdiri dari:

- Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- Implementasi
- Pemanfaatan (*benefits*)
- Evaluasi program pembangunan.

Menurut Supriatna, prinsip partisipasi menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dan lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan masyarakat di dalam perencanaan "termasuk indentifikasi kebutuhan", pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan kegiatan pembangunan masyarakat di daerah pedesaan. Penyelenggaraan kegiatan ini pun sekaligus bertujuan untuk:

- Mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan
- Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat
- Memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap peran pemuda dan wanita yang merupakan bagian terbesar penduduk pedesaan.

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan definisi konsep, bahwa partisipasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam tahapan atau fase disebut partisipasi prosedural sedangkan partisipasi masyarakat dalam salah satu tahap saja disebut partisipasi parsial. Dalam hal ini penulis akan menguraikan mengenai fase-fase atau tahap-tahap partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat. Dengan kata lain partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsur masyarakat, lembaga-lembaga sosial lainnya (Siagian, 1972:108). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membuat suatu rencana pembangunan, biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, sikap, budaya lokal, dan disiplin para anggota pengurus kelompok masyarakat pemanfaat (nelayan).

Koentjaraningrat (1983) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu:

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus. Dalam tipe yang pertama, Rakyat pedesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik. Kalau Rakyat ikut serta berdasarkan atas keyakinan bahwa proyek itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, tanpa mengharapkan upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya diperintahkan dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta bendanya kepada proyek tadi, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat tadi. Contoh partisipasi orang desa dalam proyek pengerasan atau melebarkan jalan, membuat saluran irigasi dan sebagainya.
2. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tetapi masih termasuk proyek pembangunan, tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri.

Oleh karenanya untuk melihat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, maka bentuk partisipasi masyarakat nelayan (KMP) yang penulis amati adalah:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

3. Partisipasi dalam pemanfaatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
4. Partisipasi dalam pemantauan atau evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

B.2.4. Non Governmental Organization “NGOs”, Lembaga Masyarakat “LSM”

Menurut pendapat Uphoff (dalam Priyono 1996:98) istilah antara *Non Governmental Organization* (NGOs) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering kali tumpang tindih, sebab keduanya tidaklah sama karena LSM adalah bagian dari NGOs dan NGOs belum tentu merupakan LSM. Sebab penggunaan NGOs mengacu pada sektor di luar pemerintah, sedangkan LSM mengacu pada tingkat masyarakat bawah. Disamping itu, NGOs sebagai suatu organisasi atau kelompok yang sangat heterogen tetapi pada dasarnya adalah ingin memperjuangkan tujuannya sehingga menjadi kenyataan, yaitu menginginkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Masyarakat yang perlu diberdayakan adalah orang miskin di kota dan desa diantaranya buruh, masyarakat pesisir (nelayan), petani dan masyarakat marginal/pinggiran. Masyarakat tersebut diberdayakan agar dapat mandiri sehingga posisi tawar masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah semakin kuat. Pemberdayaan tersebut berarti membela, melindungi dan memihak kepada yang lemah, serta mencegah adanya eksploitasi terhadap masyarakat lapisan

bawah. Proses pemberdayaan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara sinergi.

Dalam pemberdayaan masyarakat, kekuatan NGOs pada umumnya dan LSM pada khususnya terletak pada ruang gerak yang luwes, karena merupakan kelompok kecil yang hubungannya akrab satu sama lain, berasal tumbuh dari masyarakat dan peluang untuk berkembang sangat memungkinkan karena banyak masalah yang belum dapat dijangkau oleh kebijakan pemerintah.

Kelemahan NGOs khususnya LSM antara lain karena tidak ada dukungan formal termasuk prasarannya; kegiatan LSM seringkali bersifat eksperimental, administrasi yang masih lemah, kurang terampil, kurang mempertimbangkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Masalah yang dihadapi LSM antara lain masalah keterbatasan dana dan ketergantungan pada pihak donatur. Kondisi tersebut di atas dapat menyebabkan menurunnya etos kerja. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi antara lain berkaitan dengan kelompok binaannya terutama dalam menghadapi golongan masyarakat miskin akan mengalami kesulitan terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan, termasuk sikap masa bodoh, rendahnya masyarakat yang dibina, terbatasnya kader dan rendahnya partisipasi tokoh masyarakat.

Pendekatan NGOs dalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain adalah :

1. Pendekatan kemanusiaan,

Membantu secara spontan dan sukarela kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan karena terkena musibah. Pendekatan ini dilakukan oleh

lembaga penyandang dana.

2. Pendekatan pengembangan masyarakat.

Mengembangkan masyarakat dengan tujuan mendirikan dan menswadayakan masyarakat miskin yang termarginalkan terutama masyarakat miskin yang berada di pedesaan dan pesisir pantai.

3. Pendekatan pemberdayaan rakyat,

Dengan tujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah, dengan cara melindungi dan membela pihak yang lemah.

Proses pemberdayaan masyarakat yang digunakan LSM dengan cara menjadi fasilitator atau pendampingan, dengan tujuan membantu rakyat mengorganisir diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Selain itu LSM juga membantu mendapatkan sumber daya dari luar sebagai tambahan sumber daya lokal.

Kembali pada pembaharuan sikap dan perilaku pemberdayaan masyarakat yang sifatnya naik turun dan mudah kembali ke sikap perilaku lama, oleh karena itu peranan tenaga pendamping menjadi sangat penting. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Parji M Utomo, Marsudi dan Marsono yang mengatakan bahwa :

***“...Tenaga pendamping sangat berperan di dalam pemberdayaan, tanpa mereka tidak ada tempat bertanya masalah program”
(wawancara tanggal 1 Juli, 4 Juli dan 6 Juli 2003).***

Tenaga pendamping menjadi kunci tercapainya pembaharuan yang diharapkan, karena tenaga pendamping-lah yang mengatur irama pembaharuan. Irama ini senantiasa disesuaikan dengan energi yang dimiliki masyarakat serta

lingkungan yang mempengaruhinya. Hal ini disampaikan seorang pamong desa, Pak Riyadi yang mengatakan bahwa :

***“...Dalam pembuatan proposal proyek dibantu oleh tenaga pendamping, disamping itu juga dibantu dalam pembelian alat-alat tangkap ikan dengan kualitas yang baik dan harga yang murah”
(wawancara tanggal 15 Juli 2003).***

Kelihaian tenaga pendamping dalam mencermati lingkungan merupakan “seni” tersendiri. Bagaimana tenaga pendamping memanfaatkan peluang yang ada dari lingkungan agar sinergi terhadap perubahan merupakan langkah strategis membuka jalan pemberdayaan masyarakat.

Analisis SWOT merupakan pengetahuan dasar yang harus dipahami bagi seorang tenaga pendamping. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan kelompok sasaran serta ancaman dan peluang yang ada di lingkungannya, seorang tenaga pendamping dapat menawarkan strategi pembaharuan terhadap kelompok sasaran.

Sikap dan perilaku negatif yang dimiliki masyarakat (miskin) harus dipandang sebagai suatu tantangan bagi seorang tenaga pendamping. Dan memang sikap itulah harus “diubah” oleh masyarakat itu sendiri, sedangkan pendamping berperan meningkatkan kesadaran mereka.

Pentingnya tenaga pendamping dalam proses pemberdayaan adalah menjaga agar aktivitas tidak keluar dari rencana strategis yang dibuatnya sendiri serta melakukan pengawasan intensif dan kritis terhadap ancaman yang dapat mengganggu tercapainya tujuan. Pada hakekatnya hubungan antara masyarakat dan tenaga pendamping adalah hubungan saling memberi dari yang dimilikinya. Masyarakat pesisir (KMP) memiliki informasi data, sedangkan tenaga

pendamping memiliki sistem pengorganisasian. Dengan adanya interaksi yang positif dan saling memberi, maka terjadi proses pengayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Hasil wawancara penulis dengan Agus Salim, seorang pamong desa Sindutan mengatakan:

“...Pelatihan oleh tenaga pendamping dengan metode andragogi ini sangat membantu, karena tidak ada yang merasa lebih pintar tetapi saling memberi dan menerima satu sama lain (cara belajar orang dewasa)” (wawancara tanggal 8 Juli 2003).

Dalam berinteraksi, dominasi tenaga pendamping harus sangat minimal dan walaupun terjadi hanya bersifat sementara, biasanya dilakukan pada awal kegiatan. Selanjutnya dengan penuh kesadaran, pendamping harus mampu mengatur iramanya kapan harus aktif dan kapan harus pasif. Jangan sampai terjebak dalam “kenikmatan” dijadikan panutan atau tumpuan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu “kesadaran peran” sebagai tenaga pendamping harus terus dilakukan, dan ingat bahwa tenaga pendamping bersifat tidak selamanya.

Bagi tenaga pendamping, jangan beranggapan bahwa masyarakat tidak mampu, tetapi yang lebih penting adalah upaya apa yang harus dilakukan agar kemampuannya dapat optimal, tanpa memberi iming-iming. Apapun yang diperoleh harus melalui perjuangan, baik secara individu atau kelompok.

Dalam kegiatan usaha, kunci pemberdayaan adalah bagaimana kelompok atau individu mampu melakukan penumpukan dana bergulir, menabung adalah strategi paling sederhana untuk melihat keinginan usaha. Hal ini dikatakan oleh Budiarto bahwa:

“...Setelah hasil tangkapan dijual di TPI, pendapatan langsung dipotong untuk ditabung atau menjadi dana simpanan karena nelayan sewaktu-waktu ada kesulitan dapat diambil, untuk

kebutuhan sehari-hari atau digunakan untuk modal usaha kembali” (wawancara tanggal 16 Juli 2003).

Menabung mengindikasikan kemampuan untuk mengorbankan harta untuk berusaha. Dan yang terpenting dari menabung bukan jumlah uangnya tetapi keinginan atau aktivitas yang dilakukannya. Sekecil apapun nilai uang sudah menunjukkan keinginan untuk mengelola uang. Keterampilan mengelola uang ini yang diharapkan dalam proses menabung.

B.2.5. Participatory Rural Appraisal “PRA”

Pengembangan metode Rural Appraisal “PRA” mulai banyak diterapkan di Indonesia yang telah menyelenggarakan pengenalan, pelatihan dan penerapan metode PRA dalam program pengembangan masyarakat sejak tahun 1993. Dengan tujuan untuk meningkatkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih meningkatkan keterlibatan nyata masyarakat dalam program tersebut.

Kegiatan ini diawali pada tahun 1993 dengan membentuk suatu tim untuk mempelajari PRA di lembaga MYRADA di India yang telah mengembangkan metode ini. Sekembalinya dari kunjungan belajar tersebut, diselenggarakan pelatihan-pelatihan dan penerapan PRA dalam program pemberdayaan. Dengan pengalaman penerapan pendekatan PRA ini ternyata cukup membesarkan hati karena mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak.

Dengan memahami metode PRA sebagai dasar pemberdayaan masyarakat artinya adalah mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

Cita-cita pemberdayaan masyarakat melalui usaha-usaha pembangunan masyarakat yang partisipatif bukanlah suatu hal yang baru, dan bukan pula suatu hal yang khas pendekatan PRA. PRA berkembang dari tradisi keilmuan yang telah ada, juga dari pemikiran-pemikiran pendekatan partisipatif pembangunan lainnya. Artinya PRA tidak dianjurkan sebagai suatu pendekatan murni yang berkembang berdiri sendiri, melainkan bersumber dari berbagai pendekatan yang ada sebelumnya. Yang paling mendasar dalam penerapan PRA adalah pemahaman prinsip-prinsip dan falsafah yang tercakup dalam pemahaman metodologi PRA dan menguraikan mengenai berbagai aspek dasar metodologi PRA ini, termasuk tantangan perkembangannya di masa depan.

Di Indonesia khususnya belum ada kesepakatan tentang istilah dan cakupan yang tepat untuk pendekatan PRA ini. Namun berdasarkan pengalaman selama ini, penerapan PRA memiliki komitmen dasar untuk digabungkan ke dalam upaya pengembangan program. Kegiatan PRA bukanlah pelibatan masyarakat dalam sebuah "paket" penerapan PRA, melainkan dalam sebuah proses berkesinambungan selama kegiatan bersama, antara penyelenggara program dan masyarakat. Tetapi hal ini dikeluhkan oleh Eko Heri wahyono dan Sarjio yang mengatakan bahwa:

"...Antara prorgam dan masyarakat dalam hal ini nelayan, tidak ada proses sosialisasi program sehingga nelayan tidak tahu menahu tentang program PEMP yang menggunakan teknik PRA" (wawancara tanggal 30 Juni 2003).

Karena itu, PRA dalam pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-

kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan di masyarakat, tidak sesuai yang diharapkan.

PRA telah menghasilkan suatu lapangan baru, tetapi setiap ahli sejarah mengetahui tidak ada sesuatu-pun di dunia ini yang baru, apa yang tampak sebagai suatu “penemuan” seringkali hanya merupakan penggalian kembali dari yang sudah ada. Mungkin ini cara yang paling aman untuk menyatukannya dan untuk mengatakan bagi saya telah terjadi penemuan, meskipun beberapa diantaranya merupakan tutup lama bagi yang lainnya. Untuk memahami latar belakangnya; ada baiknya kita perbandingkan antara penelitian ekstratif tradisional dengan RRA di satu sisi dan PRA di satu sisi yang lain.

Untuk mendapatkan kinerja yang baik dalam PRA maupun RRA, para praktisi dan fasilitator perlu mengikuti prinsip-prinsip dasar. Ada beberapa prinsip yang benar-benar sama, dan beberapa lainnya lebih ditekankan dalam PRA.

Tabel 5.2
Kesinambungan RRA dan PRA

Sifat Proses	RRA	PRA
- Cara melakukan	Penggalian	Saling membagi-pemberdayaan
- Peran orang luar	Penyelidik	Fasilitator
- Informasi dimiliki, dianalisis dan digunakan oleh	Orang luar	Masyarakat setempat
Metode yang digunakan	RRA	PRA

Sumber : PRA memahami desa secara partisipatif, 1992

Sebagian besar prinsip-prinsip tersebut bersifat mempengaruhi daripada dipengaruhi. Prinsip-prinsip itu didapatkan melalui praktek-praktek percobaan, mencari apa yang dapat dan apa yang tidak, serta menjawab pertanyaan mengapa.

Suatu perbedaan yang utama antara penelitian dengan RRA ekstraktif dan PRA partisipatif adalah orang, tingkah laku, sikap dan peran. Dalam penelitian ekstraktif tradisional dan RRA, orang luar "kami" bersifat dominan. "Kami" menentukan agenda, mendapat dan memiliki informasi itu. "Kami" adalah pengumpul, pemroses dan pembuat hasil. Dalam PRA, terjadi hal yang sebaliknya. "Kami" mendorong dan membiarkan "mereka" menjadi dominan, untuk menentukan lebih banyak agenda, untuk mengumpulkan, mengungkapkan dan menganalisis informasi serta membuat rencana. "Kami" adalah fasilitator, orang yang belajar dan sekaligus juga konsultan. Kerjasama yang baik antara fasilitator (konsultan) dan masyarakat nelayan dalam proses pemberdayaan dengan teknik PRA, saling menguntungkan, hal ini diakui oleh Joko Samudro seorang konsultan sebagai berikut :

"...Kegiatan kami adalah membentuk hubungan, mengadakan rapat serta mempercepat proses, menyatakan, membantu dalam penggunaan metode dan mendorong masyarakat memilih serta mengimprovisasi metode untuk diri mereka sendiri. "Kami" melihat, mendengar dan belajar, secara metamorfosis, dan kadang-kadang secara nyata, kami "mengoperkan tongkat" otoritas" (wawancara tanggal 25 Juni 2003).

Orientasi partisipatif PRA telah memberikan dorongan baru pada pengembangan metode. Salah satu hal yang menggembirakan dari PRA adalah kurangnya cetak biru. Partisipasi menghasilkan keanekaragaman, warga desa memainkan suatu bagian dalam interpretasi, penerapan dan terkadang penemuan metode itu sendiri. Dalam PRA terdapat prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.

- Pemberian fasilitas artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penyajian dan pemahaman oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya, dan juga mempelajarinya. Ibarat “mengalihkan tongkat” mereka sering memerlukan orang luar yang memulai kemudian kembali duduk dan meninggalkannya, namun tidak mewawancarainya atau melakukan interupsi.
- Kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis, artinya fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik. Ini termasuk merangkul kesalahan menerima kesalahan sebagai suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik; dan setiap saat menggunakan penilaian orang yang paling baik, yang berarti dapat menerima tanggung jawab diri.
- Saling berbagi informasi dan gagasan antar masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda, serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda.

Semua prinsip tersebut dengan tingkah laku, karena diterapkan dalam praktek oleh masyarakat yang melaksanakan. Tetapi pembagian prinsip oleh PRA dan RRA lebih bersifat epistemologis; sedangkan prinsip-prinsip tambahan yang ditekankan oleh PRA lebih bersifat personal. Perbedaan ini menunjukkan penekanan baru dalam PRA yaitu pada tingkah laku dan orang luar dalam berinteraksi dengan masyarakat desa, suatu penekanan yang dapat menjadi bagian berguna bagi RRA maupun PRA pada masa yang akan datang.

B.3. Hubungan Faktor Internal dengan Pemberdayaan Nelayan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial pendidikan, kesehatan dan agama, lingkungan dan infrastruktur. Pengembangan aspek ekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan, sedang aspek sosial penting untuk meningkatkan IPTEK dan IMTAQ serta sikap dan perilaku. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan ekonomi akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya alam, laut dan pesisir yang ada, teknologi yang tersedia serta kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemberdayaan masyarakat nelayan, maka akan dilihat secara internal seperti berikut ini.

B.3.1. Hubungan Antara Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Pemberdayaan

Kualitas sumber daya manusia yang dicirikan oleh perilaku iman dan takwa IMTAQ serta wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK, kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama. Hal tersebut penting untuk diperhatikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolanya.

Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk didalamnya kebijakan pemerintah, akses permodalan, pasar dan tata ruang kawasan pesisir.

Sumber daya manusia wilayah pesisir khususnya masyarakat pesisir, selayaknya memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut, terutama yang berkaitan dengan sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) dan jasa-jasa lingkungan (*environmental resources*). Namun pada kenyataannya fenomena yang terjadi sampai saat ini cukup memberi gambaran bahwa dari berbagai sisi dan indikator kualitas kehidupan, sebagian besar nelayan masih tergolong sebagai bagian penduduk yang dikategorikan miskin dan terbelakang.

Kemiskinan maupun gambaran keterbelakangan kondisi dan kualitas kehidupan para nelayan terkait dengan budaya, kebiasaan hidup (*life habit*) serta prasarana dan sarana pendukung aktivitas kehidupan di lingkungannya. Dipandu dengan kondisi alam, khususnya lautan luas yang cukup sering tidak ramah, pada akhirnya terciptalah karakter SDM yang kawasan pesisir yang khas, antara lain berupa kondisi individu, kondisi lingkungan dan efek psikologis tersendiri.

Memahami kondisi yang telah terstruktur sejak lama di kalangan nelayan, mengetahui potensi wilayah yang *marketable* untuk dikembangkan serta melakukan upaya bersifat pendidikan dan peningkatan keterampilan teknis, adalah rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mengubah secara bertahap kualitas kehidupan nelayan.

Sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi kegiatan PEMP perlu dilakukan kegiatan pelatihan yang dilanjutkan dengan realisasi kegiatan ekonomi (usaha). Pelatihan yang dilakukan meliputi 4 (empat) kategori/kelompok materi pelatihan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan pelatihan tersebut meliputi pelatihan pengembangan potensi diri (*Achievement Motivation Training*), kewirausahaan, penyusunan rencana usaha, dan teknis perikanan. Rangkaian kegiatan pelatihan yang berkesinambungan ini dilakukan untuk menciptakan nuansa kesatuan dan keutuhan pencapaian sarana dan tujuan program serta memberikan landasan pokok bagi langkah pelaksanaan dan pembinaan peserta program dalam kegiatan selanjutnya.

Pendekatan pendidikan bagi orang dewasa (metode andragogi) melalui kegiatan pelatihan pencapaian prestasi (*Achievement Motivation Training*) dan membuka wawasan wirausaha yang efektif diharapkan dapat mengubah pola pikir dan pola sikap masyarakat pesisir ke arah yang lebih positif, kreatif dan dengan motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan dilengkapi oleh pelatihan teknis dan sekaligus dilanjutkan dengan pelaksanaan (*pilot project*) pengelolaan usaha perikanan diharapkan masyarakat pesisir mampu melakukan kinerja usaha yang produktif, menguntungkan dan efisien.

Materi pelatihan yang diberikan kepada masyarakat kawasan pesisir peserta PEMP terdiri dari serangkaian materi/topik terpilih. Materi yang disusun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir, tujuan yang ingin

dicapai dan jumlah waktu yang telah diprogramkan kelompok materi pelatihan yang perlu diberikan terdiri dari :

1. Pengembangan potensi diri (*Achievement Motivation Training*)
 - a. Perkenalan, pengenalan diri dan kontrak belajar
 - b. Pengembangan kreativitas
 - c. Komunikasi
 - d. Membangun kerjasama kelompok (*team building*)
 - e. Berpikir positif dan berani ambil resiko
 - f. Gaya kerja dan kepemimpinan
2. Kewirausahaan
 - a. Karakteristik wirausaha
 - b. Manajemen organisasi dan manajemen produksi
 - c. Manajemen pemasaran dan manajemen usaha/bisnis
 - d. Manajemen keuangan
3. Perencanaan usaha
 - a. Pembentukan dan tata tertib kelompok usaha
 - b. Perencanaan komponen biaya investasi
 - c. Perhitungan keuntungan usaha dan pembagian manfaat
4. Teknis perikanan

Materi teknis perikanan disesuaikan dengan kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada serta jenis usaha yang dikembangkan.

Seluruh pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan metode andragogi (metode belajar orang dewasa) dan ELC (*Experiencing Learning Cycle*), yaitu

metode belajar berdasarkan pengalaman kerja. Metode andragogi sangat tepat digunakan karena ramuan antara ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Metode andragogi juga memiliki keunggulan tersendiri, karena mampu memberi kesempatan kepada peserta untuk terlibat aktif dalam proses belajar di dalam maupun di luar kelas (lapangan) melalui praktek langsung. Dengan demikian pelatihan ini tidak memberikan metode paedagogi yang umumnya berupa ceramah yang cenderung bersifat menggurui atau mengajari sehingga menyebabkan peserta pasif, cepat merasa bosan dan mengantuk.

Melalui penerapan metode andragogi terjadi hubungan saling membantu antar peserta dengan fasilitator dan terjadi komunikasi multi arah. Pengalaman kelompok peserta dan fasilitator merupakan sumber pelajaran. Fasilitator juga dapat melakukan pengamatan yang mendalam untuk lebih memahami karakter tertentu dari individu dan kelompok peserta pelatihan. Pada akhirnya penerapan metode ini dapat membantu menambahkan kemampuan kerja sama dalam kelompok, yang kelak diimplementasikan melalui berbagai bentuk partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

B.3.2 Hubungan Antara Lingkungan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Aspek lingkungan penting untuk pelestarian sumber daya pesisir dan laut, serta pemukiman. Aspek infrastruktur dibutuhkan untuk memperlancar Mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Aspek tersebut harus ditunjang oleh

kelembagaan sosial ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal.

Sesuai dengan tujuannya, lokasi program PEMP harus merupakan daerah yang berada di kawasan pesisir atau pantai. Pemilihan lokasi propinsi dan kabupaten barangkali tidak menjadi masalah bila seluruh propinsi dan hampir seluruh kabupaten di Indonesia memiliki kawasan pesisir dan potensi wilayahnya dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Panduan pemilihan lokasi ini lebih ditekankan pada pemilihan lokasi kecamatan dan desa.

Lokasi kecamatan dan desa yang terpilih untuk pelaksanaan program PEMP diprioritaskan memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kecamatan dan desa yang memiliki potensi sumber daya laut dan pesisir yang belum atau kurang dimanfaatkan.
2. Kecamatan dan desa yang memiliki jumlah penduduk miskin, relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah sekitarnya.
3. Mata pencaharian penduduk dan desa tersebut sebagian besar bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya laut dan pesisir disekitarnya.
4. Kecamatan dan desa yang memiliki aksesibilitas yang memadai dengan daerah sekitarnya sehingga dapat menunjang pemasaran hasil produksi dari daerah tersebut.
5. Kecamatan dan desa yang belum pernah menerima program yang serupa dengan program PEMP.

6. Kecamatan dan desa yang memiliki struktur penduduk relatif muda dan tingkat pendidikan relatif baik.

Penyusunan program pengembangan masyarakat merupakan langkah awal yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program PEMP. Meskipun program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi, namun untuk keberhasilan program dalam jangka panjang maka program pengembangan yang dibuat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga mencakup program sosial dan program pengembangan infrastruktur.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam menyusun program pengembangan di suatu kecamatan atau desa.

1. Penyusunan program pengembangan didahului dengan survei identifikasi terhadap beberapa aspek yang meliputi :
 - a. Sosial; jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin dan rasio beban tanggungan, tingkat pendidikan penduduk, tingkat kesehatan penduduk, agama, keamanan, adat dan budaya.
 - b. Ekonomi; mata pencaharian dan pendapatan penduduk, ketenagakerjaan, sumber kegiatan ekonomi dan lembaga ekonomi.
 - c. Sumber perikanan; potensi, pemanfaatan.
 - d. Lingkungan dan sarana; sumber daya alam dan sumber daya perikanan, lingkungan vegetasi dan perairan, lingkungan permukiman, sarana perhubungan, komunikasi, pendidikan, ekonomi, agama dan kesehatan.
 - e. Kelembagaan; organisasi ekonomi dan sosial, peraturan dan kebijakan.

2. Survei identifikasi dilaksanakan dengan menggunakan metode (*Rapid Rural Appraisal dan Basic Needs Identification*).
3. Data-data yang diperoleh dari hasil identifikasi dianalisis sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program pengembangan.
4. Program pengembangan yang disusun meliputi program pengembangan ekonomi, program sosial, program pengembangan kelembagaan dan program lingkungan dan infrastruktur.
5. Program pengembangan yang telah disusun disosialisasikan dan diseminarkan di tingkat kabupaten untuk memperoleh masukan dari penyerasian dengan program-program yang akan dikembangkan.

Pemilihan peserta program merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaan program. Peserta program harus memahami visi dan misi program PEMP karena pelaksanaan program ini tidak hanya untuk memberdayakan peserta secara individu, tetapi mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk pengembangan masyarakat setempat dan pengembangan wilayahnya, sehingga keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari keberhasilan peserta secara individu tetapi juga dari keberhasilan masyarakat dimana program tersebut dilaksanakan.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dan memperhatikan skala dan tingkat kelayakan ekonomi. Pengembangan organisasi dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis pada budaya lokal perlu dilakukan

untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi yang akan dikembangkan. Hal ini penting terutama untuk membantu mengantisipasi dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.

B.3.3. Hubungan Faktor Eksternal Dengan Pemberdayaan Nelayan

Program PEMP di Kabupaten Kulon Progo yang dipusatkan di dua kecamatan yakni Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon tidak terlepas dari dukungan lingkungan. Menurut Steers (1980:8) salah satunya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut meliputi dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat. Dari hasil penelitian mengenai hubungan faktor eksternal tersebut dengan pemberdayaan nelayan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah Daerah

Ada satu pandangan yang menyatakan bahwa suatu masyarakat sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan apabila tanpa ada uluran tangan dari pihak lain. Ini terjadi karena mereka sudah terjebak dalam suatu lingkaran, yang hanya bisa diterobos melalui bantuan pihak lain.

Hal ini juga terjadi pada masyarakat nelayan, walaupun sebagian dari mereka tidak bisa dikatakan miskin, namun untuk bisa meningkat lebih baik lagi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada peraturan pemerintah yang mendukungnya, ataupun campur tangan langsung dari pihak luar. Oleh karena itulah maka bicara tentang program-program intervensi dalam masyarakat nelayan itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu intervensi langsung maupun tidak langsung. Intervensi tidak langsung adalah peraturan-peraturan pemerintah yang

secara tidak langsung ikut membantu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan intervensi langsung adalah bantuan langsung yang diberikan oleh lembaga di luar komunitas nelayan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai lembaga keuangan yang disediakan oleh pemerintah walaupun salah satu misinya adalah untuk membantu masyarakat melalui kredit usaha kecil, namun ternyata dalam prakteknya juga belum menyentuh masyarakat nelayan. Hal ini terbentur pada masalah agunan yang harus dijaminkan kepada pihak bank apabila meminjam uang. Masalahnya kemudian adalah mendapatkan agunan yang sesuai dengan nilai pinjaman itulah yang sulit dilakukan oleh para nelayan. Memang benar argumen itu dapat berupa perahu, namun seperti yang dikatakan oleh seorang informan, dengan agunan perahu maka nilai pinjaman akan sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa digunakan membeli perahu. Disamping itu peminjam juga harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SKIP (Surat Ijin Kapal Perikanan) yang biasanya tidak dimiliki oleh nelayan tradisional. Hal ini juga dipersulit lagi dengan sistem pengembalian yang bersifat bulanan, yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan kenelayanan. Memang pada musim ikan, pengembalian bulanan bukan hal yang sulit dilakukan oleh para nelayan. Namun hal ini tidak mungkin bisa dilakukan apabila di laut sedang mengalami paceklik ikan. Jika ini terjadi, bisa dipastikan bahwa angsuran tidak akan dapat terbayar.

Problem di atas dialami bukan hanya nelayan kecil, melainkan juga oleh nelayan besar. Oleh karena itu, maka apa yang disebut sebagai lembaga perbankan

sebetulnya bisa dikatakan hampir tidak ada akses yang dimiliki oleh masyarakat nelayan.

Melalui pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Koperasi Unit Desa (KUD), para nelayan mengharapkan sekali bantuan untuk peningkatan teknologi penangkapan. Bantuan itu sangat diharapkan karena kredit perbankan sulit untuk mereka dapatkan, dengan alasan tidak ada agunan.

2. Dukungan Masyarakat

Dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan laut, berbagai usaha yang dilakukan masyarakat nelayan untuk beradaptasi. Usaha yang dilakukan bisa saja sesuai dengan yang diharapkan, namun bisa juga gagal. Adapun usaha yang dilakukan untuk “menakhlukan” lingkungan, pada dasarnya dapat digolongkan menjadi beberapa usaha yang dilakukan masyarakat nelayan antara lain :

a. Diversifikasi

Diversifikasi yaitu perluasan alternatif pilihan mata pencaharian yang dilakukan masyarakat nelayan, baik di bidang perikanan maupun non perikanan.

b. Intensifikasi

Intensifikasi yaitu strategi untuk melakukan investasi pada teknologi penangkapan yang lebih eksploitatif, agar produksi ikan yang diperoleh bisa lebih banyak.

c. Pembentukan organisasi

Upaya lain yang dilakukan masyarakat nelayan untuk memberdayakan dirinya adalah dengan membentuk kelompok koperasi nelayan.

d. Pengembangan jalur tangkap

Ada kesadaran yang tumbuh di kalangan elit masyarakat nelayan, untuk mengembangkan jalur wilayah tangkapan yang lebih jauh (*off-shore fishing*).

e. Mengatasi permodalan

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat nelayan pada umumnya selain mengumpulkan dengan menyisihkan pendapatan ketika mendapatkan hasil yang cukup besar, juga dengan mencari pinjaman pada pemilik modal, yaitu para pedagang ikan (bakul).

Dua hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pengembangan suatu usaha masyarakat nelayan adalah keadaan sumber daya manusia dan keadaan lingkungan tempat masyarakat itu berada. Dua hal ini penting, sebab dengan potensi lingkungan berbeda maka teknologi yang digunakan untuk mengolahnya juga berbeda. Begitu juga perbedaan kualitas sumber daya manusianya, selain berbeda cara mereka memperlakukan lingkungannya, serta pendekatan terhadap mereka juga berbeda-beda pula.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam kerangka teori, penulis telah jelaskan bahwa secara teoritis ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan. Berdasarkan kajian teoritis dan pengamatan di lapangan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan, maka penulis mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon meliputi faktor internal dan eksternal.

Seiring dengan perubahan paradigma pertumbuhan masyarakat nelayan, yang berkaitan dengan program PEMP di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon, maka faktor internal dirasakan memegang peranan yang sangat penting. Karena faktor inilah yang akan menjadi penggerak, pelaksana dan pendukung berhasil tidaknya PEMP di Kecamatan Panjatan dan Temon di Kabupaten Kulon Progo. Faktor internal ini harus segera menyesuaikan dengan masyarakat nelayan dan harus memperhatikan lingkungan yang terus berubah agar mampu memberdayakan sesuai perkembangan tuntutan masyarakat nelayan. Dimana masyarakat nelayan menginginkan pemberdayaan yang dapat membantu dalam hal permodalan, pelatihan, teknologi dan alat tangkap (jaring). Pemberdayaan yang demikian akan terwujud apabila masyarakat nelayan mempunyai kemampuan daya tangkap dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan, produktivitas yang tinggi dan adanya pemerataan atau keadilan.

Hasil dari pengumpulan data baik yang dilakukan melalui Wawancara terstruktur maupun berdasarkan hasil observasi, terutama terhadap pelaksanaan proyek PEMP di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan berjalan relatif baik walaupun belum sepenuhnya lancar. Dalam artian masih ada hambatan dan keterbatasan. Walaupun demikian tujuan dari PEMP selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, juga dalam hal mempertahankan ekologi pesisir pantai (lingkungan).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurang lancarnya pelaksanaan PEMP banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan nelayan. Kurangnya

pemahaman masyarakat nelayan ini disamping karena minimnya juga pelatihan yang diberikan Dinas Perikanan setempat. Bila dikaitkan dengan pendapat Siagian (2000:152) yang mengemukakan bahwa “Kegiatan pelatihan dan pengembangan perlu dilakukan karena sumber daya manusia merupakan *resources* yang paling strategis”, tentu hal ini perlu dibenahi. Tujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan adalah untuk mendukung dan mewujudkan tujuan program antara lain adalah :

1. Membentuk kelompok usaha masyarakat nelayan kreatif, memiliki sikap dan perilaku positif, memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
2. Membentuk kelompok usaha masyarakat nelayan, memiliki kemampuan untuk membangun, memelihara dan mengembangkan kerjasama dalam kelompok yang dikelola.
3. Membentuk kelompok usaha masyarakat nelayan, memiliki jiwa wirausaha (*entrepreneurships*) sehingga menjadi wirausahawan yang tangguh.
4. Membentuk kelompok usaha masyarakat nelayan selain memiliki jiwa wirausaha juga memiliki jiwa sosial dan peduli terhadap lingkungan.

Oleh karena itu secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat nelayan mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya dengan baik, maka akan tercipta pemberdayaan masyarakat wilayah itu sendiri serta meningkatkan pendapatan ekonomi dan memperbaiki etos kerja.

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan juga diperoleh hasil bahwa pelaksanaan proyek PEMP belum dilaksanakan dengan baik, dalam artian

masih ada kendala. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pengetahuan tentang masalah pemberdayaan. Karena untuk proyek PEMP ini diperlukan suatu jaringan kerjasama kelompok nelayan (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) untuk menggulirkan dana bantuan kredit kepada kelompok yang lain, dengan tujuan agar masyarakat nelayan yang lain juga ikut diberdayakan.

Dengan demikian kemampuan KMP sebagai salah satu faktor penting di dalam masyarakat nelayan, yang pada akhirnya menunjukkan kualitas pemberdayaan. Kemampuan ini tidak saja ditunjukkan oleh tingkat pendidikan dan pelatihan, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti pemahaman terhadap KMP, sikap mental etika di dalam pemberdayaan. Untuk mengatasi hal ini, konsultan manajemen kabupaten/kota (KM kab/kota) telah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan, dengan Diadakannya pelatihan bagi anggota KMP.

Kenyataan di atas dan juga fakta yang penulis jumpai di lapangan menunjukkan bahwa walaupun telah banyak dana bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan masyarakat nelayan, baik berupa pengadaan bangunan, peralatan, pelatihan maupun pemberian pinjaman uang, namun hasilnya ternyata belum seperti yang diharapkan. Hal ini karena program tersebut belum direncanakan dengan baik, sehingga pembuatan TPI dan pengolahan ikan misalnya tidak dimanfaatkan. Semua itu terjadi karena program-program yang dilakukan tidak disertai dengan pembinaan, misalnya dengan dibentuk kelompok usaha bersama dalam pengolahan ikan dengan memanfaatkan sarana yang telah

disediakan, dan tidak ada pendampingan hingga kelompok usaha bersama tersebut bisa benar-benar mandiri.

Untuk menunjang program PEMP yang berkaitan dengan dana bergulir tersebut, KM kab/kota telah membentuk KMP penerima bantuan. Akan tetapi, pembentukan kelompok tersebut tidak berpengaruh terhadap kemandirian nelayan, karena memang tidak ada pembinaan. Satu-satunya fungsi kelompok hanyalah sebagai instrumen pengguliran dana untuk mempermudah cara pengangsuran pinjaman. Diharapkan dana angsuran dari 4 (empat) KMP itu dapat digulirkan pada yang lain, sehingga jumlah anggota semakin lama akan semakin bertambah. Seiring dengan bertambahnya jumlah angsuran yang telah disetorkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan angsuran berjalan, penambahan anggota tidak terjadi, karena dana yang disetorkan itu ternyata belum digulirkan pada kelompok yang baru.

Kesan umum yang berkembang di kalangan masyarakat nelayan adalah pemerintah kurang memberi perhatian pada nelayan, yang terbukti pada tidak adanya program perkreditan yang secara khusus diberikan kepada nelayan. Hal ini terlihat pada praktek KUD yang hanya memiliki program Kredit Usaha Tani (KUT), yang lebih diarahkan untuk kepentingan pertanian. Kondisi inilah yang membuat kecemburuan di kalangan nelayan, karena menurutnya hasil tangkapan nelayan itu jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan hasil pertanian, misalnya bawang merah. Logikanya jika ikan busuk masih laku dijual, tetapi jika bawang merah busuk tidak laku dijual. Tidak adanya program pinjaman khusus untuk membantu nelayan itulah yang menyebabkan nelayan tidak mempunyai

pilihan lain kecuali bergantung pada sumber informal yaitu para langganan (bakul ikan).

Dua hal utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pengembangan suatu masyarakat nelayan adalah keadaan sumber daya manusianya, dan keadaan lingkungan tempat masyarakat itu berada. Dua hal ini penting, sebab dengan potensi lingkungan yang berbeda, maka teknologi yang digunakan untuk mengolahnya juga berbeda. Begitu juga dengan perbedaan kualitas sumber daya manusianya, selain akan berbeda cara mereka Memperlakukan lingkungannya, juga pendekatan terhadap mereka perlu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pula.

Dalam masyarakat nelayan, secara konkret hal itu dapat dilihat pada perbedaan sumber daya (ikan misalnya), yang membutuhkan alat tangkap yang berbeda. Perbedaan alat tangkap itu juga diperlukan dengan kondisi laut yang berbeda. Perairan di wilayah pantai Utara dengan gelombang laut yang relatif kecil misalnya, tentunya membutuhkan alat tangkap dan strategi yang berbeda dengan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Selatan Pulau Jawa, yang gelombangnya lebih besar. Begitu juga latar belakang pendidikan, budaya, etnisitas dan sebagainya, pendekatannya juga memerlukan cara yang berbeda. Sebagai suatu daerah yang berada di wilayah Pantai Selatan Pulau Jawa, wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan perikanan. Karena itu untuk pengembangan masyarakat nelayan di daerah ini, bagaimana potensi lingkungan dan sumber daya manusianya merupakan hal yang perlu dikaji.

Berdasarkan fakta-fakta di atas membuktikan bahwa baik faktor internal maupun faktor eksternal pada proyek PEMP memiliki pengaruh dalam memberdayakan masyarakat nelayan, yang pada hakekatnya masih terbelakang dalam hal penguasaan teknologi dan rendah sumber daya manusia nelayan itu sendiri. Hal ini yang mengakibatkan posisi bargaining masyarakat nelayan sangat rendah, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kabupaten Kulon Progo berdasarkan SK Kadin Pertanian dan Kelautan No. 188/1133/VIII/2002 tentang penetapan lokasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun 2002 di Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon ini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat pesisir yang notabene adalah masyarakat nelayan yang berada di bawah garis kemiskinan (tidak berdaya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kulon Progo, yang diamati dari dimensi Pemberdayaan, Partisipasi, NGO dan teknik PRA ternyata belum maksimal. Hal ini terlihat dari terabaikannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis (Juknis) program PEMP.

Hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kurang berkualitasnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kulon Progo. Faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai faktor internal yang meliputi sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat.

Faktor sumber daya manusia sangat terkait dengan kemampuan masyarakat pesisir itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat

nelayan kurang siap dan kurang mampu dalam melaksanakan program PEMP. Hal ini disebabkan pendidikan formal rata-rata setingkat SLTA juga disebabkan kurangnya pelatihan tentang kenelayanan, cara melaut dan cara mengolah ikan yang baik.

Selanjutnya faktor lingkungan, berdasarkan hasil penelitian karena letaknya berada di pantai selatan pulau Jawa yang sangat dipengaruhi oleh arus dan gelombang yang besar, hal ini juga menghambat di dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mencari ikan di laut.

Untuk variabel eksternal dapat dilihat dari dukungan pemerintah dan masyarakat. Dari hasil penelitian memberikan gambaran bahwa dukungan pemerintah hanya sebatas pada pembuatan aturan-aturan. Demikian juga dukungan masyarakat yang kita harapkan belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan karena PEMP baru pertama kali dan masih hal yang baru bagi masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo.

Faktor internal maupun faktor eksternal seperti yang penulis uraikan di atas akan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemberdayaa ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kulon Progo.

B. Saran

Analisis keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, di Kabupaten Kulon Progo, melalui penelitian ini kurang memenuhi harapan karena masih banyak yang harus dibenahi untuk memperbaikinya dimasa depan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Masyarakat nelayan harus dilibatkan dari awal sampai akhir agar apa yang menjadi tujuan proyek PEMP akan tercapai sesuai yang diinginkan.
2. Merubah pola pikir masyarakat atau opini tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, harus dikembalikan hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran nelayan masih rendah, sehingga apapun bantuan dari pemerintah dianggap bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Hal ini banyak menyebabkan program-program banyak yang tidak berhasil (tidak sesuai yang diharapkan) untuk itu harus diantisipasi dengan :
 - Harus ada kesadaran untuk mengembalikan, setidaknya ada dasar hukum yang mengikat
 - Masyarakat nelayan ketika menjual hasil tangkapan langsung dipotong beberapa persen untuk membayar pinjaman, diusahakan masyarakat nelayan menyisihkan sebagian hasil untuk pelatihan agar keterampilan masyarakat nelayan bertambah (meningkatkan keterampilan SDM).
3. Masyarakat nelayan harus mempunyai KUD atau koperasi khusus nelayan yang meminjamkan modal seperti KUT dibidang Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Cohen, John M. dan Norman T. Uphoff. (1980) "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity." Dalam *World Development* 8.
- Djohani, Rianingsih. Buku Acuan. *Penerapan PRA, Berbuat Bersama Berperan Serta*. Studio Driya Media Bandung, Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara (KPD TNT) Didukung dari The Ford Foundation, 1996.
- Friedmann, John. (1993) *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass : Blackwell Book.
- Kulon Progo Dalam Angka, Badan Pusat Statistik (BPS) 2001
- Lembaga Pengembangan Masyarakat, Ekonomi dan Bisnis (LPMEB), *Prinsip dan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)*, Makalah, Bogor, 2000.
- Long, N and Long, eds (1992), *Battlefield of Knowledge : The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*, Routledge, London and New York.
- Maslow, Abraham H., *Motivation and Personality*, Harper and Row, new York, 1954.
- Midgley, James. (1986) "Community Participation: History, Concepts and Controversies." Dalam James Midgley (et.al), *Community Participation, Social Development and the State*. New York : Methuen Inc.
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndaraha, Taliziduhu, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Bina Aksara Jakarta.
- Oakley, Peter dan David Marsden (1984), *Approaches to Participation in Rural Development*, Geneva : ILO.
- Quade, 1984, *Implementasi kebijakan*. Penerbit Bina Aksara Bandung
- Paul, Samuel. (1987) *Community Participation in Development Projects – The World Bank Experience*, Washington DC: The World Bank.

- Pearse, Andrew & Michael Stiefel. (1987) *Inequality into Participation: A Research Approach*, Geneva: UNRISD.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka AMW., *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA 3, Malang.
- Singaribun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, 1978 : 34.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Supardi Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Penerbit Alumni, Edisi ke II, Bandung, 1994.
- Samudra wibawa, 1994, *Implementasi Kebijakan Public*. Penerbit Balai Pustaka
- Solichin, Abdul Wahab, 1990, *Komunikasi Kebijakan* . penerbit Balai Pustaka Jogjakarta
- Wahyono, Ari et, al. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan* , Penerbit Media Presido, Yogyakarta, 2001
- Widyatmadja, Yosef P. (1992) "Peranan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan." Dalam UPKM FE. UKSW. *Yang Terdesak Yang Berkumpul*. Semarang : Percetakan Satya Wacana.

Referensi Non Buku :

Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 Penerbit Sinar Grafika.

Jurnal :

Easton, David. *An Approach to the Analysis of Political System*, dalam *World Politics*, Volume IX, No. 3 (April 1957).

Media Inovasi, No I TH. VIII / 1998

Norman, Angela. (1977) "Pedagogy of the Oppressed: A Methodology of Adult Literacy or A Philosophy of Development." *Reading Rural Development Communications Bulletin*, October.

Lampiran I

Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo

